

BAB V
DINAMIKA ELEKTORAL: KEKALAHAN PETAHANA DAN
KEMENANGAN PENANTANG PILKADA LOMBOK UTARA
TAHUN 2020

Penyajian hasil penelitian yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder dijelaskan pada bab V. Pada bagian ini menjelaskan dan menguraikan mengenai mengapa petahana mengalami kegagalan dalam mempertahankan kekuasaan pada kontestasi pilkada. Selain itu juga melihat kontestasi dalam persepsi kegagalan dan persepsi harapan yang tidak terpenuhi akan menjadi awal untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu apakah alam dapat dilihat sebagai sebuah peristiwa arena kontestasi kekuasaan para kandidat. Selain itu juga, pada bab ini akan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab kekalahan petahana pada kontestasi di Lombok Utara pada tahun 2020.

5.1 Kegagalan Petahana Dalam Kontestasi Politik Di Kabupaten Lombok Utara

Kontestasi politik cenderung mengalami dinamika yang begitu cepat termasuk terhadap faktor yang menyebabkan kekalahan petahana pada. Kekalahan petahana pada perhelatan cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat prediktif, di antaranya, citra diri petahana yang dianggap tidak menarik, perubahan perilaku dari pemilih, program kerja yang tidak terealisasi sesuai dengan yang tertuang di dalam visi dan misi pada saat kampanye, munculnya konflik internal partai yang berimplikasi terhadap pecahnya dukungan partai pendukung, munculnya

ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja dari petahana pada saat memimpin di daerah. Namun berbeda dengan apa yang terjadi pada kontestasi Lombok Utara 2020, bahwa Pasangan NADI selaku petahana mengalami kekalahan dengan Pasangan JODA, kekalahan tersebut disebabkan oleh faktor non prediktif yaitu isu penanganan bencana.

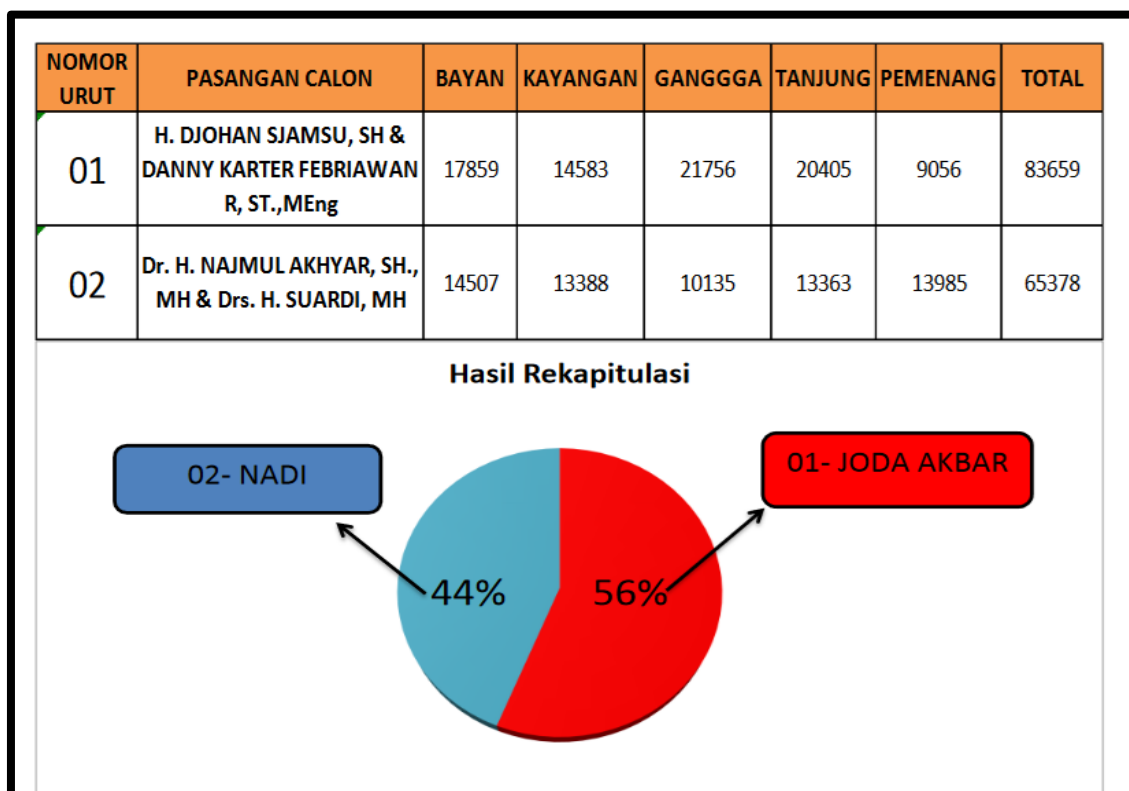
Selama ini, isu penanganan bencana hanya dimaknai sebagai sebuah peristiwa tunggal yaitu dalam konteks bencana, penanganan dan pembangunan sesuai dengan regulasi masa pemulihan pasca terjadinya bencana. Kemenangan ataupun kekalahan petahana mengalami dinamika yang begitu kompleks, tidak hanya terfokus pada isu-isu politik namun juga dapat dipengaruhi oleh isu bencana. Kajian yang dilakukan oleh Miller (2013) menjelaskan bahwa pertarungan politik tidak hanya berfokus tentang gejala politik saja, namun juga bersinggungan dengan bagaimana kemampuan petahana dalam merespons situasi sebagai keuntungan elektoral. Mechel dan Hainmueller (2011), memperkuat temuan yang dilakukan oleh Miller bahwa situasi dapat menjadi keuntungan bagi petahana dalam mendapatkan simpati publik. Hasil temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa tumbangnya petahana kandidat Pasangan calon Najmul-Suardi pada kontestasi di Lombok Utara 2020 memiliki korelasi yang kuat dengan tata kelola bencana pada situasi krisis.

Kontestasi politik para kandidat di Lombok Utara, menyuguhkan dua orang kuat lokal dalam perspektif ketokohan maupun keagamaan keduanya pernah menjadi Bupati dan Wakil Bupati pada periode pertama 2010-2015 yaitu H. Djohan Syamsu dan Najmul Akhyar. Basis kekuatan kedua tokoh pemekaran Lombok Utara tersebut dapat dikatakan berimbang satu sama lain tentunya dengan sama-

sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hasil perolehan suara di KLU dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 yaitu. Djohan Syamsu dan Danny Carter Febriawan yang terkenal dengan Pasangan Calon JODA dengan perolehan suara sebesar 83659 dengan persentase 56% sedangkan pasangan nomor urut 2 yaitu Pasangan Najmul Akhyar dan H. Suardi yang dikenal dengan pasangan NADI memperoleh suara sebesar 65378 atau dengan persentase 44 %. Berikut dapat dilihat perolehan suara masing-masing calon pada di Lombok Utara pada tahun 2020:

Gambar. 5.1

Perolehan Suara Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2020



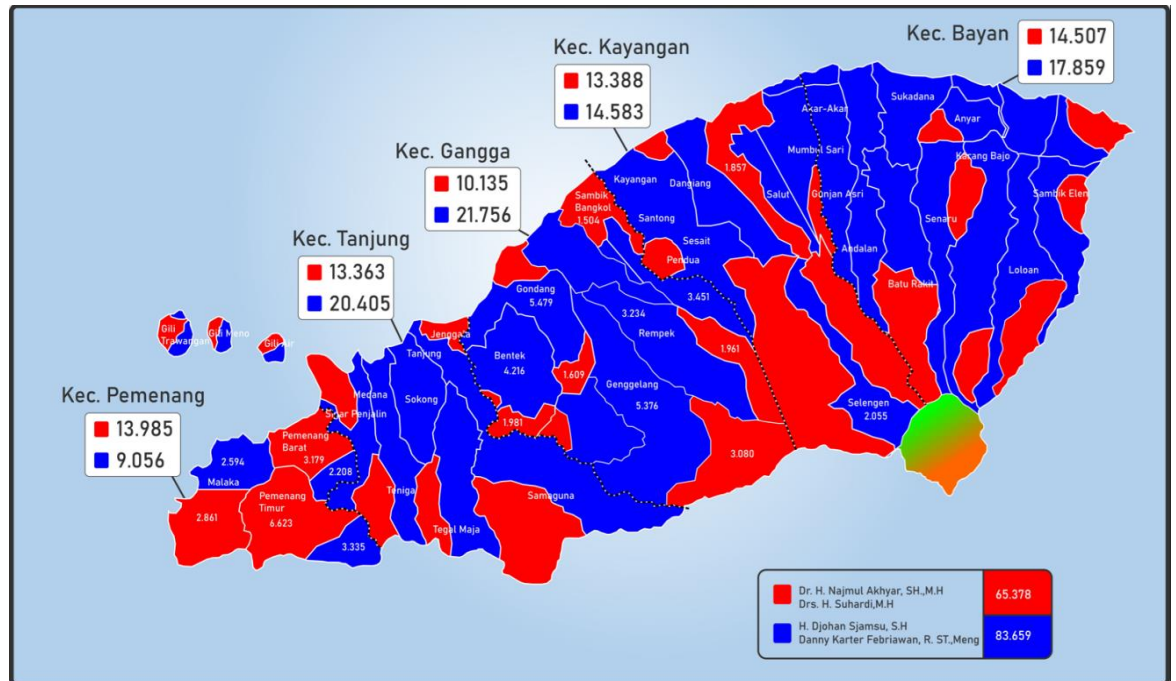
Sumber: Analisis Data Penelitian, 2024.

Data di atas menunjukan bahwa perolehan suara para calon pada Pilkada KLU, di dominasi oleh kemenangan suara nomor 1 yaitu H. Djohan Syamsu, SH, dan Danny carter Febriawan yaitu memenangkan suara di 4 wilayah yaitu di Kecamatan Bayan dengan perolehan suara 17859, Kecamatan Kayangan 14583, Kecamatan Gangga 21756, dan Kecamatan Tanjung 20405, serta mengalami kekalahan hanya pada satu kecamatan yaitu Pemenang sebagai basis suara dari pasangan nomor urut 2. Sedangkan pasangan NADI, sebagai petahana hanya mampu memenangkan kontestasi pada satu kecamatan saja yaitu menang dengan perolehan suara sebesar 13985.

Kekalahan petahana di empat (4) Kecamatan menunjukan bahwa faktor isu penanganan bencana yang sangat dominan yang menjadikan suara petahana mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pengaruh bencana memiliki peran yang dominan dalam kekalahan petahana pada perhelatan pilkada di Lombok Utara. Kegagalan petahana tersebut berkaitan dengan progres dalam penyelesaian persoalan pembangunan sektor perumahan masyarakat yang belum tertangani secara maksimal. Capaian pemerintah/petahana justru menjadi bahan evaluasi masyarakat sebagai modal untuk menentukan sikap politiknya sebelum pemilihan dilakukan. Selain itu, persoalan bantuan sosial jaminan hidup yang dijanjikan pemerintah bagi korban bencana Lombok Utara, tidak terealisasi secara menyeluruh dan bertahap menimbulkan kesan yang berbeda ditengah masyarakat yang hidup dalam serba kekurangan. Kondisi inilah yang disinyalir menjadi faktor utama petahana mengalami penurunan suara sehingga mengalami kekalahan. Berikut dapat dilihat sebaran perolehan suara para kandidat pada peta di bawah ini:

Gambar 5.2

Peta Perolehan Suara Pasangan Calon Pilkada Lombok Utara, 2020



Sumber: Olahan Data Penelitian, 2025

Berdasarkan peta sebaran perolehan suara para kadidat diatas, dapat dilihat sebaran prolehan suara para calon di setiap Kecamatan di Pilkada Lombok Utara tahun 2020. Perolehan suara Pasangan Djohan-Dany di Kec. Bayan unggul signifikan dengan perolehan suara mencapai 17.859 suara, Kec. Kayangan Paslon JODA unggul atas petahana dengan perolehan suara sebesar 14.583 suara, Kec. Gangga Paslon JODA unggul signifikan atas petahana dengan perolehan suara sebesar 21.756 suara, Kec. Tanjung Paslon JODA unggul atas petahana dengan perolehan suara sebesar 20.405, sebagai wilayah yang menjadi basis utama suara Paslon JODA, sedangkan paslon petahana hanya mampu menang pada satu wilayah yaitu Kec. Pemenang sebagai basis suara utamanya dengan perolehan suara sebesar 13.985 suara.

5.2 Persepsi Kegagalan Penanganan Bencana di Kabupaten Lombok Utara

Pasangan petahana Najmul dan Suardi memiliki rekam jejak dan personal karakteristik yang cukup baik jika dilihat dari capaian kinerjanya selama menjabat sebagai kepala daerah maupun Sekretaris Daerah di Lombok Utara. Sebagai salah satu daerah yang paling terakhir mendapatkan pemekaran di Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Utara pada masa kepemimpinan H. Najmul Akhyar dan H. Suardi mendapatkan beberapa penghargaan dari pemerintah pusat seperti, dana reksa atas kinerjanya dalam bidang pengelolaan keuangan dengan predikat terbaik.

Prestasi yang telah ditorehkan oleh pasangan NADI dalam menjalankan pemerintahan termasuk berkaitan dengan klaim keberhasilan penanganan gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara, justru tidak mampu membendung arus informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Masihnya warga masyarakat yang belum mendapatkan bantuan rumah RTG sampai menjelang membuat kepercayaan publik kepada pasangan NADI menjadi tergerus secara masif, munculnya konflik di antara penyedia barang dan kelompok masyarakat (POKMAS) terkait dengan bangunan fisik yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, termasuk adanya penyedia barang yang tidak menuntaskan pekerjaannya justru membawa dana Pembangunan RTG kabur, sehingga berurusan dengan pihak kepolisian dan keterlambatan masyarakat yang mendapatkan bantuan menjadi persoalan yang muncul pada saat masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Berikut dapat dilihat data realisasi penerima bantuan RTG dan JADUP pada tahun 2020 di Lombok Utara:

Table.5.1
Data Penerima Bantuan Rumah Tahan Gempa (RTG) dan Jaminan Hidup
(JADUP) tahun 2020 di Lombok Utara.

No	Nama Kecamatan	Penerima Bantuan Rumah Tahan gempa dan Jaminan Hidup	
		Rumah Tahan Gempa	Jaminan Hidup
		Realisasi	Realisasi
1	Kecamatan Bayan	14.200	600
2	Kecamatan Kayangan	9.000	520
3	Kecamatan Gangga	10.300	734
4	Kecamatan Tanjung	10.700	670
5	Kecamatan Pemenang	6.000	544
Data Usulan		72.000	3.600

Sumber: Fasilitator BPBD, Lombok Utara Tahun 2020.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat progres dalam realisasi RTG dan JADUP di setiap kecamatan belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat artinya belum maksimal. Kondisi ini tentunya memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan bencana. Jika mengacu kepada penerima manfaat dari bantuan rumah tahan gempa yang diusulkan pada tahun 2018-2019 dan realisasi sebanyak 72.000 unit perumahan tentunya data tersebut harus dipastikan realisasinya sesuai dengan usulan sebelumnya. Termasuk juga kaitan dengan bantuan jaminan hidup kepada masyarakat korban gempa yang sangat jauh dari jumlah seharusnya yang diusulkan dan realisasi hanya 3.600 penerima manfaat.

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan, Najmul Akhyar selaku Bupati Kabupaten Lombok Utara, pada media Suara NTB, <https://www.suara.com>:

Bahwa masih ada kekurangan dana untuk bantuan pasca gempa pada tahun 2018 sebesar Rp. 1,8 triliun, di mana tersebut dialokasikan untuk pembangunan rumah di lombok. Terdapat 73 ribu rumah rusak akibat gempa yang terjadi, pemerintah daerah baru menerima dana dari pemerintah

pusat sebesar Rp. 1,07 Triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk verifikasi awal total kekurangan yang rusak sebanyak 73 ribu rumah, namun dana yang masuk ke rekening Rp. 1,77 triliun dan kekurangannya Rp.1,8 triliun.

Pemerintah daerah telah menentukan berbagai cara untuk mempercepat masa pemulihan setelah bencana terjadi di KLU, hal utama yang menjadi perhatian serius yaitu pembangunan perumahan warga masyarakat yang telah hancur. Jumlah unit rumah yang terbangun kurang lebih 20.000 unit dari jumlah 75.000 rumah. Dr. Najmul mengharapkan pusat dengan cepat memberikan bantuan dana stimulan kepada warga yang belum mendapatkan bantuan pemerintah. Anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah dikisar Rp. 900 M. Pemerintah juga memberikan perhatian secara serius menghadapi berbagai potensi bencana alam termasuk juga gempa.

Menurut Kepala BPBD Kabupaten Lombok Utara, Muhadi dalam penuturannya pada media Inside Lombok (<https://insidelombok.id>),

“Secara keseluruhan banyaknya hunian warga masyarakat yang mengalami kerusakan pada tahun 2018 sebanyak 75,741 perumahan yang seberannya di wilayah Lombok Utara. Jumlah data yang mengalami kerusakan berat 26.885 unit rumah, sedangkan dalam progres membangun 3.085 unit. Sedangkan perumahan yang mengalami kerusakan ringan berjumlah 507 unit dengan rincian sebanyak 128 unit di antaranya semula mengalami kerusakan sedang dan 379 unit lainnya mengalami rusak dalam kategori ringan.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Komandan Resort Militer 162 Wira Bhakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, pada media Inside Lombok, bahwa:

“Perkembangan pembangunan perumahan warga yang terdampak pada masa peralihan pemulihan di Lombok Utara akibat bencana gempa bumi mencapai 40% dari keseluruhan perumahan yang mengalami kerusakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa percepatan proses penanganan bencana menunjukkan tren yang sangat baik. Harapan kita semua dengan sudah terselesaikannya pembangunan rumah, para pengungsi bisa dapat kembali kermah dan dapat beaktifitas seperti sedia kala guna untuk melangsungkan kehidupan yang lebih baik. Dalam rangka tetap menjaga keberlanjutan

pembangunan wilayah diperlukan koordinasi dari berbagai lembaga guna mempercepat masa pemulihan kondisi warga masyarakat. Komunikasi harus tetap dibangun dengan pemerintah daerah melalui BNPB guna memastikan setiap proses pendataan warga yang terdampak sesuai dengan kondisi real di lapangan.

Transisi masa pemulihan daerah pasca bencana 2018 lalu, sampai menjelang Pilkada Lombok Utara 9 Desember 2020 terus mengalami progres yang positif, seperti apa yang disampaikan oleh Bupati, Najmul Akhyar dan Kepala BPBD Lombok Utara pada salah satu media, bahwa progres pembangunan kembali perumahan warga sudah mulai terbangun meskipun secara bertahap. Dari total jumlah rumah yang rusak mencapai 75.761 unit, terdapat sebanyak 3.085 unit sudah mulai terbangun. Meskipun demikian, stigma masyarakat terhadap pemerintah dalam hal proses maupun progres penanganan di KLU, masih mendapatkan penilaian yang kurang baik dari publik.

Penjelasan tersebut sesuai dengan penuturan dari seorang masyarakat atas nama, M. Habibullah, asal desa Akar-akar Kec. Bayan:

“bahwa distribusi bantuan yang kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan publik, karena sebagian terdistribusi dan sebagian tidak terdistribusi bantuan tersebut ke masyarakat. Kekalahan Bapak Najmul-Suardi pada 2020, karena mereka Adalah petahana dan menjabat maka kinerja pemerintah dalam hal ini petah ana selalu ada celah untuk dibuatkan isu yang bisa mempengaruhi menurunnya kepercayaan masyarakat kepada mereka”.

Hasil wawancara dengan seorang warga masyarakat dari desa Mumbul Sari Kec. Bayan Kabupaten Lombok Utara, atas nama Ria yaitu:

“Terkait dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat untuk sektor perumahan tahan gempa atau banyak orang menyebutnya bantuan RTG kurang sesuai karena banyak masyarakat yang mengeluh terkait dengan

bantuan RTG yang tidak semua orang mendapatkan bantuan. “Dalam hal penanganan masa pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah untuk RTG Kurang jika dilihat dari sisi kecepatan dan ketepatan sasaran”. Saya memilih Pasangan Najmul-Suara Pada Lombok Utara 2020 lalu karena alasan secara ideologis garis organisasi keagamaan saya yaitu NW.

Hasil wawancara dengan, Rasidi Arif asal Desa Bentek Kec. Gangga Lombok Utara

Tidak, seharusnya Apakah distribusi bantuan kepada masyarakat terkait dengan Rumah Tahan Gempa (RTG), sesuai dengan rencana awal pemerintah dengan memberikan uang sebesar Rp. 50 Juta kepada setiap warga masyarakat yang terdampak gempa, namun itu tidak dilakukan dengan pertimbangan keterbatasan material dan dampak ekologis. Tetapi yang lebih tahu apa yang kami butuhkan ia diri kami sendiri.

Hasil wawancara dengan seorang kelompok masyarakat, Dian Agung Adi Putra, 28 Desember, 2024. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Kalau dilihat kecepatan pembangunan RTG, lumayan, akan tetapi masih perkembangan dalam hal percepatan dalam pemulihan pasca adanya gempa, dikarenakan perumahan yang dibangun sangat banyak, ada Kesan lambat bagi yang belum mendapatkan bantuan. Untuk penanganan pasca gempa, belum efektif karena. Masih kurang, karena ada beberapa warga yang belum mendapatkan bantuan RTG sesuai dengan waktu dan jadwal yang ditentukan. Sudah barang tentu pasangan Najmul-Suardi melakukan deklarasi sebelum pemilihan dilakukan karena mereka bagian dari pemerintah atau calon petahana. Secara otomatis mereka harus menyelesaikan persoalan perumahan dan bantuan sosial yang dibutuhkan masyarakat, karena itu nanti akan menjadi penilaian kinerja mereka dan bisa berdampak terhadap dukungan suara mereka pada saat pemilihan. Kekalahan Najmul-Suardi pada saat Pilkada 2020 lalu, sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menyelesaikan persoalan perumahan dan bantuan berupa jaminan hidup kepada masyarakat. jika dilihat dari proses penanganan persoalan perumahan pasca bencana dan masa rehabilitasi Pembangunan terus dilakukan namun sangat jauh dari harapan dan kemauan masyarakat itu sendiri. Instruksi Presiden Jokowi pada saat itu, memberikan arahan bahwa untuk Pembangunan kembali pasca bencana gempa bumi, akan memberikan dana stimulant 50 juta bagi korban yang rusak berat, dan 25 dengan kualitas kerusakan menengah dan 10 juta dengan kualitas kerusakan yang dalam kategori ringan, bantuannya akan diberikan berupa uang tunai, namun dalam prakteknya tidak demikian, warga masyarakat dimintai untuk membuat kelompok masyarakat (POKMAS), dan proses pengerjaan pembangunan dan penyediaan bahan-bahan bangunan dilakukan oleh aplikator. Hal inilah yang membuat proses Pembangunan menyebabkan banyak persoalan

yang muncul dilapangan, bahan tidak sesuai dengan ukuran dan jenis, banyak oknum palikator yang tidak bertanggung jawab membawa uang pokmas”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat di Lombok Utara cenderung menghasilkan faktor eksternal sebagai penyebab kekalahan petahana Pasangan NADI pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Faktor eksternalnya yang dimaksud hanya terkait dengan isu bencana. Masyarakat hanya menilai ketepatan, kecepatan, dan efektivitas serta kesesuaian distribusi bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap distribusi RTG yang ditemukan banyak mengalami persoalan baik secara kebijakan maupun teknis.

Masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan RTG menjadi bahan catatan masyarakat terhadap kinerja petahana, termasuk sebagian yang sudah mendapatkan RTG, namun tidak sesuai dengan harapan mereka. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan RTG pada tingkat Rusak Berat, tetapi mendapatkan RTG pada tingkat Rusak Sedang bahkan Rusak Ringan. Termasuk perihal ketepatan dan kecepatan dalam pendistribusian RTG dan bantuan lainnya. Ketepatan yang tidak akurat serta kecepatan tidak terlalu baik menjadi penyebab kekalahan petahana. Penanganan pasca bencana yang masih belum efektif tersebut dianggap sebagai kegagalan yang menyebabkan kalahnya Pasangan NADI pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.

Selain RTG, salah satu bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada korban bencana di Lombok Utara adalah bantuan langsung tunai berupa jaminan hidup bagi warga masyarakat yang terdampak. Pemerintah pusat telah menyediakan bantuan sosial tersebut untuk mengurangi dampak negatif bencana terhadap

kelangsungan hidup dan kesejahteraan sosial penduduk korban gempa. Pasal 15 Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial) mengamanatkan pemberian bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan penguatan kelembagaan sebagai bentuk bantuan sosial kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan sosial, termasuk bencana alam. Terutama bantuan langsung, bantuan ini sangat diperlukan agar korban bencana bisa tetap dapat hidup secara wajar. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PP 39/2012) menetapkan 9 jenis bantuan langsung yang kemudian ditambahkan oleh Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana (Permensos 1/2013) sehingga total tersedia 11 jenis bantuan langsung. Mengingat sifatnya yang sangat penting, Kementerian Sosial menetapkan Peraturan Menteri Sosial No. 4 tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana (Permensos 4/2015) untuk mengatur penyaluran bantuan langsung berupa uang tunai kepada korban bencana.

Tabel. 5.2
Jenis dan Persyaratan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Untuk Korban Bencana

No.	Jenis Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	Keterangan	Syarat Dokumen Kependudukan
1	Pembiayaan bahan bangunan rumah	Bantuan pembiayaan pembelian bahan bangunan bagi korban yang rumahnya mengalami kerusakan per Kepala Keluarga	Fotokopi identitas kependudukan atau keterangan domisili bagi kepala keluarga dari pejabat kelurahan atau kepala desa
2	Pembiayaan jaminan hidup	Bantuan untuk menopang biaya hidup korban bencana per individu	Identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat

3	Pembiayaan isi hunian sementara dan hunian tetap	Bantuan pembiayaan peralatan rumah tangga per kepala keluarga	Identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat
4	Pembiayaan santunan ahli waris	Bantuan yang diberikan kepada ahli waris setiap anggota keluarga yang meninggal akibat bencana	Identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat
5	Pembiayaan penguatan ekonomi korban	Bantuan untuk korban bencana dengan kondisi sosial ekonomi tidak mampu untuk mendukung kebutuhan usaha keluarga korban	Identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2018.

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa Layanan administrasi kependudukan (adminduk) memegang peranan kunci dalam penyediaan data serta dokumen kependudukan yang dipersyaratkan untuk mengakses bantuan sosial. Sistem adminduk secara sewaktu merekam data pribadi penduduk di suatu wilayah dan mencatat berbagai peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya. Data ini dapat digunakan sebagai dasar penghitungan penyediaan bantuan sosial, pemetaan awal penduduk terdampak bencana, serta basis verifikasi dan validasi penerima bantuan. Sistem adminduk juga menyediakan dokumen kependudukan sebagai identitas hukum penduduk dan bukti hak atas bantuan dari pemerintah.

Secara umum, dokumen kependudukan sudah mulai diprasyarkan sebagai salah satu mekanisme untuk mempertanggungjawabkan penyaluran bantuan langsung setelah kejadian bencana. Selain itu, dokumen kependudukan juga diprasyarkan oleh bank apabila penduduk ingin membuka rekening penerima bantuan langsung atau mengurus kembali buku tabungannya yang hilang atau rusak

akibat bencana. Ketiadaan dokumen kependudukan bisa menjadi salah satu hambatan bagi penduduk untuk mendapatkan bantuan langsung. Padahal, terkait dengan gempa di Lombok Utara, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 memperkirakan tidak semua penduduk, khususnya KLU, memiliki dokumen kependudukan sebelum gempa terjadi. Kesenjangan ini lebih banyak dialami oleh penduduk miskin dan termiskin. Data SUSENAS 2018 menunjukkan penduduk yang tidak memiliki Akta Kelahiran di KLU adalah penduduk miskin dan termiskin (Kementerian PPN/Bappenas, 2018).

Tabel . 5.3
Situasi Kepemilikan Akta Kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Penduduk

Situasi	Nasional	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Utara	Data Disdukcapil Kab. Lombok Utara *per Juli 2018
	*Berdasarkan estimasi SUSENAS 2018			
Kepemilikan Akta Kelahiran semua anak	83,8% (estimasi : 70.679.958)	80,3% (estimasi : 1.402.720)	92,9% (estimasi : 72.198)	Belum ada data
Kepemilikan Akta Kelahiran anak di bawah 5 tahun	72,1% (estimasi: 17.012.564)	60.2% (estimasi: 300.042)	85,3% (estimasi: 19.826)	Belum ada data
Kepemilikan Akta Kelahiran anak di bawah 1 tahun	51,8% (estimasi: 2.487.367)	31,5% (estimasi: 31.427)	49,1% (estimasi: 1.728)	Belum ada data
Kepemilikan NIK semua orang	93,8% (estimasi: 247.861.049)	95.4% (estimasi: 4.768.240)	95,9% (estimasi: 209.026)	Belum ada data

Kepemilikan NIK semua anak	90,3% (estimasi: 75.129.707)	89,7% (estimasi: 1.589.641)	93,7% (estimasi: 72.943)	Belum ada data
Kepemilikan NIK anak di bawah 5 tahun	75,1% (estimasi: 17.761.382)	73,2% (estimasi: 366.662)	85,5% (estimasi: 19.870)	Belum ada data
Kepemilikan NIK anak di bawah 1 tahun	50,8% (estimasi: 2.449.641)	42,4% (estimasi: 42.754)	41,0% (estimasi: 1.443)	Belum ada data

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2018.

Pelayanan adminduk penting untuk diintegrasikan ke dalam mekanisme kesiapsiagaan bencana dan pemulihan pascabencana karena berkaitan langsung dengan proses seperti penerimaan bantuan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana. Bagi pemerintah, pelayanan adminduk sebelum dan pasca bencana akan menghasilkan data yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan bantuan bagi korban bencana. Bagi masyarakat, pelayanan adminduk memberikan manfaat untuk mendapatkan dokumen kependudukan yang hilang akibat bencana dan dapat digunakan langsung sebagai syarat untuk mengakses bantuan. Meskipun sudah disadari penting, pemulihan layanan adminduk pasca bencana bisa terkendala berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk karena mereka sendiri turut terdampak bencana. Pasca bencana di KLU, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) KLU rusak parah akibat gempa. Akibatnya, pelayanan adminduk lumpuh total. Tidak hanya kantor yang hancur, semua pegawai Disdukcapil juga menjadi korban bencana yang berdampak pada pelayanan dan inovasi yang telah berjalan menjadi terhenti (Kementerian PPN/Bappenas, 2018).

Pernyataan dari seluruh Responden dan sajian data menguatkan kondisi bahwa proses Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020 di Kabupaten Lombok Utara dilaksanakan di tengah dinamika penanganan bencana alam gempa bumi dan secara langsung dilanda oleh bencana non alam Covid-19, tentunya berdampak terhadap penilaian terhadap petahana berkaitan dengan penanganan yang dilakukan pasca bencana alam gempa bumi, ditambah lagi dengan penanganan terhadap kondisi bencana non alam covid-19. Respons masyarakat memunculkan suatu keputusan politik yang cenderung menghilangkan kekuatan modal sosial Najmul Akhyar, sebagai petahana untuk dipilih kembali menjadi Bupati Kabupaten Lombok Utara. Fakta bahwa terjadi kekacauan pada ketepatan sasaran serta belum rampungnya pendistribusian bantuan hingga 100% kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Utara menjadi faktor eksternal yang utama dalam kekalahan Pasangan Najmul-Suardi.

5.1.1 Kendala Struktural Dalam Penanganan Bencana “ Kewenangan Berada Pada Pemerintah Pusat”.

Situasi dan masa pemulihan pasca bencana sangat potensial dijadikan sebagai alat politik bagi pasangan calon petahana, hal ini dapat dilakukan dengan mudah karena beberapa alasan, di antaranya: (1) Petahana memiliki akses yang lebih terbuka untuk berkomunikasi dengan masyarakat korban, (2) Petahana memiliki kekuatan yang lebih untuk dapat mempengaruhi publik dengan distribusi bantuan yang akan diberikan kepada korban, (3) Petahana dapat menggunakan mesin birokrasi sebagai jembatan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat akar rumput, (4) petahana akan lebih sering terlihat di tengah-tengah masyarakat karena distribusi bantuan yang diberikan, hal ini tentunya akan menjadi peluang untuk

mempengaruhi dan meyakinkan pemilih dalam menentukan sikap politiknya. Namun demikian, pasangan calon petahana (Najmul-Suardi) tidak mampu menjadikan situasi sebagai peluang mendapatkan simpati publik, justru sebaliknya kondisi tersebut berbalik menjadi tantangan dan batu sandungan bagi pasangan calon petahana untuk dapat memenangkan pertarungan politik.

Meskipun sebagian besar kewenangan masa pemulihan berada pada kewenangan pemerintah pusat terutama terkait dengan struktur anggaran, regulasi, dan SOP teknis lapangan diluar kendali pemerintah daerah, tetap saja menjadi sasaran ketidakpuasan publik terhadap isu kegagalan penanganan bencana di daerah di tanggung oleh petahana selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap semua proses masa pemulihan. Beberapa kendala dalam pelaksanaan masa rehabilitasi dan rekonstruksi di Lombok Utara yaitu:

Tabel 5.4

Identifikasi Kendala Struktural Penanganan Bencana Gempa Bumi di
Kabupaten Lombok Utara 2018

No	Kendala Struktural Kewenangan Pemerintah Pusat	Keterangan
1.	Struktur anggaran penanganan bencana berada pada kewenangan pemerintah pusat	Bantuan dana stimulan untuk pembangunan kembali rumah tahan gempa dan bantuan sosial jaiminan hidup bagi korban bencana 88% dari dana pemerintah pusat.
2.	Proses birokrasi dan verifikasi data dan anggaran berjenjang (Time-Lag Fiscal).	Mekanisme pengajuan secara administrasi untuk pengajuan anggaran dari pemerintah daerah ke pusat membutuhkan verifikasi secara berlapis. Lintas kementerian BNPB, Kementerian PUPR dan persetujuan Kementerian Keuangan.
3.	Perubahan regulasi dan Implementasi Kebijakan	Dalam menghadapi manajemen krisis karena keterbatasan pedoman secara operasional

	Penanganan Bencana sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat	yang detail, menyebabkan kebingungan masyarakat terhadap formulasi bantuan yang pada akhirnya berdampak terhadap menurunnya kepercayaan politik masyarakat
4.	Verifikasi data penerima manfaat secara berjenjang dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat	Usulan pemerintah daerah terkait dengan hasil verifikasi tidak semuanya terakomodir oleh pemerintah pusat serta tidak sesuai dengan data usulan.
5.	Terjadinya pemblokiran dana stimulan pembangunan rumah dan jaminan hidup.	Pemblokiran dana stimulan RTG dan JADUP sampai 3 kali tahapan terkait dengan mekanisme masa tanggap darurat menjadi kendala administrasi yang berdampak terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.
6.	Pola penyaluran bantuan secara bertahap (<i>Trance System</i>) yang kaku	Kondisi krisis menyebabkan pola termin atau tahapan menimbulkan ketidakpuasan bagi warga yang belum mendapatkan bantuan karena masih tinggal di camp pengungsian.
7.	Bantuan yang tidak sesuai dengan harapan publik	Pemulihan kondisi perumahan masyarakat yang awalnya akan diberikan dana stimulan untuk pembangunan perumahan sebesar Rp. 50 Juta per Kepala Keluarga sesuai dengan Instruksi Presiden, kenyataannya tidak terlaksana, sehingga menimbulkan kekecewaan yang mendalam ke pemerintah.

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber 2025.

Berdasarkan tabel di atas menegaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah sangat terbatas pada masa transisi terutama terkait dengan struktur anggaran penanganan bencana berada pada kewenangan pemerintah pusat, proses birokrasi dan verifikasi data dan anggaran berjenjang (*Time-Lag Fiscal*), perubahan regulasi dan Implementasi kebijakan penanganan bencana, verifikasi data penerima manfaat secara berjenjang dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, pemblokiran dana stimulan pembangunan rumah dan jaminan hidup. Semua hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat di luar kedali pemerintah daerah, namun demikian pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi secara horizontal guna mempercepat proses masa rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah.

Berikut penuturan bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, pada media Lombok Post <https://lombokpost.com>,

“Pemerintah Daerah KLU, menyampaikan Rumah Tahan Gempa (RTG) yang belum terbangun hingga saat ini sebanyak 12.269 unit. Upaya pemerintah menangani dampak gempa dua tahun silam dapat dilihat dari data kerusakan, dibandingkan progres rehabilitasi serta rekonstruksi. Total pemukiman warga yang rusak berat, sedang, dan ringan berjumlah 75.741 unit. Sedangkan total infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak 85 unit. Najmul melanjutkan, kerusakan fasilitas pendidikan mencapai 294 unit. Untuk fasilitas kesehatan, bangunan fisik yang rusak meliputi satu unit RSUD, delapan unit Puskesmas, 30 unit Pustu dan 45 Poskesdes/Polindes, ditambah lagi 405 tempat ibadah, serta kerusakan pada fasilitas perekonomian meliputi pasar tradisional sejumlah 35 serta 105 hotel”. “Berdasarkan data terbaru pada tanggal 14 juli 2020, rekapitulasi keperluan Rumah Tan Gempa (RTG) sebanyak 55.170 unit. Dari jumlah itu, RTG selesai terbangun 100 persen mencapai 35.417 unit, hanya dalam tempo satu tahun 10 bulan, sedangkan RTG yang masih berproses sebanyak 7.484 unit. “BNPB mengatakan permohonan maaf karena seandainya tidak ada Covid-19 pasti akan tuntas dipenuhi”.

Salah satu anggota Pansus Rumah Tahan Gempa (RTG), Kabupaten Lombok Utara, Artadi pada media Lombok Post, <https://lombokpost.com>, dengan penuturan sebagai berikut:

“Meminta kepada Pemerintah Daerah lebih gesit lagi dalam bekerja. Terlepas dari berbagai rencana Cadangan, diingatkannya, batas waktu Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi 2018 di Lombok Utara akan berakhir pada akhir Juli, kasihan warga yang belum dapat bantuan. Masih banyaknya RTG yang belum terbangun dinilai bisa menimbulkan kecemburuan sosial, terlebih lagi, sudah hampir dua tahun warga menunggu. Artadi, juga mendorong BPBD lebih memperhatikan proses sinkronisasi data penerima bantuan RTG, sehingga tidak ada lagi komplain warga ketika SK dikeluarkan”.

Hal tersebut senada dengan penuturan Narsudin, selaku Partai Pendukung Pasangan Najmul- Suardi, pada Pilkada Kabupaten Lombok Utara tahun 2020, wawancara pada tanggal 5 Januari, 2025. Berikut petikan hasil wawancaranya:

Terkait dengan capaian pemerintah dalam menangani persoalan masa pemulihan terutama pembangunan rumah hunian masyarakat, saya lihat, pemerintah saat itu sangat progresif, apa yang menjadi target Alhamdulillah pada saat itu terutama RTG sangat luar biasa di mata masyarakat, begitu juga bangunan-bangunan gedung untuk pelayanan publik. Kalau menurut saya berkaca dari beberapa kabupaten / kota yang pernah mengalami hal yang sama, termasuk saya melihat itu sangat cepat. Karena membangun lima puluh ribu rumah lebih dalam tempo kurang lebih dalam dua tahun. Sedangkan terkait dengan faktor yang menyebabkan petahana mengalami kekalahan pada saat pilkada 2020, saya melihat ada hal yang memang di luar pikiran kita, karena pada saat itu kita berpikir bahwa petahana mampu meyakinkan masyarakat dengan kita bangunkan rumah. Tapi sisi lain itu di goreng secara politik, seolah zaman pemerintahan Najmul Syarif itu tidak sesuai dengan harapan. Padahal sangat luar biasa, tetapi memang saat itu ekonomi masyarakat belum pulih, sehingga berdampak pada electoral calon pada saat itu.

Kondisi masa pemulihan menjadi batu sandungan bagi petahana NADI dalam mempertahankan kekuasaan terkait dengan kemampuan mengelola isu bencana yang tidak tuntas memberikan penilaian tersendiri bagi masyarakat meskipun kendali kewenangan tersebut berada diluar kendali pemerintah daerah atau petahana. Komunikasi politik petahana tidak berjalan dengan efektif di wilayah-wilayah yang terdampak sehingga menyebabkan tergerusnya suara petahana. Keterlambatan proses penanganan bencana berdampak pada psikologi publik yang masih berada pada tenda-tenda pengungsian karena pencairan dana stimulan RTG mengalami kendala secara birokrasi yang sangat rumit dan berbelit. Meskipun keterlambatan distribusi bantuan juga campun tangan dari pemerintah pusat (BNPB dan Kementerian PUPUR serta Kementerian Keuangan. Masyarakat lokal di Lombok Utara secara spontan melayangkan kesalahan struktural tersebut kepada Bupati Petahana sebagai wujud wajah pemerintah pusat di daerah yang paling dekat dengan mereka.

5.1.2 Kendala Operasional di Daerah Dalam Penanganan Bencana Gempa Bumi di Lombok Utara

Keberhasilan penanganan pasca bencana sangat ditentukan oleh respons terhadap situasi kecepatan dan ketepatan masa pemulihan fisik dan ekonomi masyarakat sebagai penyintas bencana. Pemerintah Lombok Utara terus bergerak untuk memberikan pelayanan yang maksimal di tengah keterbatasan anggaran maupun berbagai kendala operasional dilapangan. Keterbatasan dan keterlambatan dukungan anggaran dari pemerintah pusat menimbulkan berbagai macam efek domino dalam tata kelola penanganan bencana di daerah. Kendala administrasi penanganan bencana tidak hanya berdampak pada teknis pelaksanaan penanganan namun juga berkontribusi pada tingkat kepercayaan publik terhadap Petahana H. Najmul Akhyar dan H. Suardi sebagai petahana dianggap tidak maksimal dalam proses penanganan isu bencana yang pada saat itu menjadi persoalan utama pasca terjadinya gempa bumi di Lombok Utara 2018-2020.

Proses penanganan Bantuan RTG dan JADUP dinilai sangat lamban oleh masyarakat dikarenakan mekanisme dan prosedur yang berlapis karena mengacu pada juklak-juknis dari kementerian serta proses pendataan dan verifikasi yang masih bermasalah secara teknis di daerah menambah beban kepala daerah petahana semakin berat ditengah desakan masyarakat yang menginginkan proses administrasi yang sederhana. Beberapa permasalahan yang mengakibatkan penanganan bencana dianggap mengalami kendala di Kabupaten Lombok Utara pada masa pemulihan yaitu:

Tabel 5.5

Identifikasi Kendala Operasional Penanganan Bencana Gempa Bumi di
Kabupaten Lombok Utara 2018

No	Kendala Operasional Masa Pemulihan di Daerah	Keterangan
1.	Sengketa data rumah	Proses verifikasi kategori kerusakan rumah dengan kerusakan berat, sedang, dan ringan terkendala administrasi yang berbelit dan berlapis.
2.	Sengketa dan status legalitas lahan.	Banyaknya warga masyarakat yang menjadi korban bencana kehilangan dokumen sertifikat kepemilikan tanah akibat gempa. Kondisi ini menimbulkan konflik internal tanah waris yang berdampak pada tertundannya proses pembentukan POKMAS.
3.	Keterbatasan Fasilitator Lapangan.	Rasio jumlah fasilitator dan pendamping dengan jumlah Pokmas tidak proporsional yang berdampak terhadap proses pencairan mengalami keterlambatan.
4.	Konstruksi bangunan untuk perumahan tidak sesuai dengan standar.	Kualitas bangunan RTG bagi korban gempa, berdasarkan pengamatan dan banyak laporan yang masuk ke pihak pendamping dan penyedia barang serta pihak lainnya, bahwa banyak rumah yang dibangun tidak sesuai dengan kualifikasi yang tertera pada gambar atau memenuhi standar rumah tahan gempa.
5.	Kesadaran masyarakat yang enggan dalam mengurus Pokmas.	Masyarakat tidak mau mengurus Pokmas disebabkan adanya kekhawatiran untuk laporan pertanggung jawaban dan laporan keuangan.
6.	Kelangkaan dan kenaikan harga material bangunan RTG.	Kelangkaan material berdampak pada inflasi harga lokal menjadi meningkat.
7.	Kurangnya Pengawasan dan Fasilitator Terlatih	Proses rekrutmen pendamping dan fasilitator tidak dilakukan berdasarkan kebutuhan kualifikasi di karena kondisi masa pemulihan pasca gempa dilakukan serba cepat sehingga berdampak terhadap kualitas konstruksi yang buruk karena kurangnya pengawasan yang memadai.
8.	Adanya oknum penyedia barang yang tidak	Terdapat beberapa oknum Aplikator yang tidak menyelesaikan pekerjaan justru

	menyelesaikan pekerjaan Secara tuntas.	membawa dana pembangunan rumah kabur ke luar daerah menjadi faktor terhambatnya penyelesaian pembangunan perumahan.
9.	Tata kelola daerah	Pemerintah daerah mengalami defisit anggaran APBD jika dipaksakan dana talangan (<i>recopusing</i>) yang tidak terencana dengan risiko penanganan bencana yang semakin terhambat.
10.	Dampak sektor sosial dan kemanusiaan.	Masa hunian sementara atau tenda darurat menjadi lebih panjang dari perencanaan awal, sehingga berdampak terhadap kerentanan kesehatan dan munculnya potensi konflik sosial di lokasi pengungsian.

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber 2025.

Masih banyaknya warga masyarakat korban gempa yang belum mendapatkan bantuan RTG setelah satu tahun gempa bumi terjadi pada tahun 2018, dari lebih 237 ribu rumah yang terdampak, baru sekitar 52 ribu yang terselesaikan atau sudah dibangun sedangkan 80 ribu lainnya dalam proses Pembangunan. Terkait dengan kualitas bangunan RTG bagi korban gempa, berdasarkan pengamatan dan banyak laporan yang masuk ke pihak pendamping dan penyedia barang serta pihak lainnya, bahwa banyak rumah yang dibangun tidak sesuai dengan kualifikasi yang tertera pada gambar atau memenuhi standar rumah tahan gempa, karena jumlah material sebagai bahan bangunan sangat terbatas sehingga berdampak terhadap kualitas bangunan. Proses rekrutmen pendamping dan fasilitator tidak dilakukan berdasarkan kebutuhan kualifikasi di karena kondisi masa pemulihan pasca gempa dilakukan serba cepat sehingga berdampak terhadap kualitas konstruksi yang buruk karena kurangnya pengawasan yang memadai. Masa pemulihan pasca bencana mengharuskan warga masyarakat terdampak untuk memberikan proses pengerjaan rumah mereka kepada aplikator yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyak

dari oknum aplikator tidak menyelesaikan pekerjaannya dan bahkan ada yang melarikan dana RTG keluar daerah.

Manajemen penanganan bencana yang tidak maksimal menjadikan persepsi publik terhadap pemerintah yang dalam hal ini Adalah pasangan NADI telah gagal dalam menangani persoalan perumahan dan jaminan hidup kepada masyarakat korban gempa di Kabupaten Lombok Utara. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Pasangan calon JODA untuk mendapatkan keuntungan secara politik dengan menjadikan isu penanganan yang belum tuntas menjadi isu utama dan strategis sebagai media kampanye menjelang pemilihan Kepala Daerah 2020 di Lombok Utara.

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh, Ketua Tim Muda Pemenangan Pasangan Djohan-Dany, Dende Devi Sarah Mandini, S,IP.,M.IP:

“Pasangan JODA melihat adanya peluang yang sangat terbuka ketika pasangan petahana tidak mampu menyelesaikan persoalan RTG dan JADUP, setiap kampanye kami menyampaikan penanganan Pembangunan perumahan yang tidak tuntas kepada masyarakat dan itu sangat efektif mempengaruhi pemilih. Isu bencana betul-betul sangat ampuh untuk meyakinkan pemilih bahwa perlu ada perubahan kepemimpinan jika ingin persoalan perumahan dan bantuan sosial Jaminan hidup dapat diselesaikan dengan tuntas. Saya melihat, kekalahan petahana Najmul-Suardi pada saat itu memang kuat karena isu kegagalan dalam penanganan bencana ditengah kehidupan masyarakat yang serbah sulit. Jadi itu kami jadikan momentum untuk materi kampanye dan sangat ampuh.

Hal tersebut senada dengan apa yang di sampaikan oleh seorang warga masyarakat Desa Jenggala Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, Rasidi, pada 10 Januari 2025:

Penanganan bencana pasca gempa di Lombok Utara lalu, tidak efektif dimana prosesnya sangat lamban tidak cepat karena banyak persoalan yang terjadi di lapangan terkait dengan tidak meratanya bantuan dari pemerintah kepada masyarakat. Masih banyaknya masyarakat yang belum

mendapatkan bantuan rumah tahan gempa (RTG) dan jaminan hidup (JADUP) yang pada saat itu membutuhkan, hasilnya mereka memilih pasangan lain yang lebih menjanjikan untuk mendapatkan bantuan.

Penuturan yang sama juga di sampaikan oleh salah satu pendukung

Pasangan Djohan-Dany, Abdul Gafur, 25 Agustus 2025:

Jika melihat proses penanganan bencana pasca gempa bumi 2018 di KLU, masih banyak ditemukan persoalan terutama terkait dengan pembangunan perumahan bagi masyarakat yang belum merata. Termasuk juga untuk bantuan jaminan hidup bagi masyarakat korban gempa yang tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan.

Hal tersebut senada dengan apa yang di sampaikan H. Djekat, selaku Ketua

DPD Partai Golkar Kabupaten Lombok Utara, wawancara pada tanggal 5 Januari 2025. Berikut petikan hasil wawancaranya:

Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemulihan pada saat itu, Kebanyakan administrasinya ya, kebanyakan ada yang dobel, kadang satu rumah rusak, kadang bisa di data dobel. Itulah yang tidak sempurna harapan masyarakat, yang memang berhak menerima dan tepat waktu menurut informasi masih ribuan RTG yang belum didapat. Saya kira mereka sudah berbuat maksimal, tapi kendalanya kan administrasi, saya kira semua Bupati dan Wakil Bupati Visi Misinya mengentaskan masalah RTG itu, kalau Pak Najmul pada waktu itu masih pada mengakomodir data, belum action. Sebenarnya efektif tidak efektif ini tergantung, awalnya Pak Presiden Jokowi kemudian digaris bawahi oleh Gubernur Majdi pada waktu itu, bahwa akan diberikan Uang langsung artinya rakyat akan membangun sendiri jika ada lebih bisa jadi modal usaha, tapi kenyataannya berubah lagi jadi rumah, sehingga carut marut datanya. Sehingga adanya persoalan itu dijadikan materi kampanye sebagai bentuk kegagalan oleh pasangan calon lawan. Semua Calon Bupati sudah komitmen untuk menuntaskan itu semua. Ini beranekaragam, ada yang katanya menagih janji harus tuntas, katanya selama jabatan Pak Najmul belum terlaksana. kembali lagi yaitu kendala tentang Administrasi data dari daerah ke pusat sana.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan penelitian diatas selanjutnya peneliti melakukan analisis melalui proses koding data dengan tujuan melakukan pengelompokan terhadap semua informasi yang diperoleh dilapangan. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah analisis dalam penarikan

kesimpulan pada penelitian disertasi ini. Berikut disajikan hasil koding data pada tabel di bawah ini:

Tabel. 5.6
Koding Hasil Wawancara dengan Informan

No	Informan	Kutipan Wawancara	Kode	Kategori	Interpretasi
1.	Informan H	Distribusi bantuan untuk korban gempa tidak merata	Ketimpangan distribusi	Persepsi kegagalan Kebijakan	Bantuan belum sepenuhnya adil
2.	Informan S	“Isu gempa 2018 mempengaruhi penilaian”	Dampak bencana	Persepsi Kegagalan	Bencana memengaruhi persepsi masyarakat
3	Informan M	Penanganan bencana dianggap belum efektif karena masih banyak masyarakat yang mendapatkan bantuan	Ketidakefektifan penanganan bencana	Evaluasi kebijakan bencana	Informan menilai penanganan bencana belum efektif karena bantuan belum menjangkau seluruh masyarakat.
4	Informan S	Kegagalan petahana NADI disebabkan karena kemampuan dalam penanganan bencana tidak sesuai dengan harapan publik	Pergeseran Dukungan Politik	Persepsi Kegagalan Petahana	Ketidakpuasan masyarakat terhadap bantuan mempengaruhi kekalahan petahana.
5	Informan	Proses penanganan RTG tidak sesuai dengan harapan publik, baik dari sisi kecepatan, ketepatan, dan tingkat efektivitasnya belum optimal	Kerumitan penyaluran bantuan dan penanganan yang belum efektif	Persepsi efektivitas dan Kegagalan	Informan menilai proses penanganan RTG dan bantuan gempa masih rumit dalam pelaksanaannya.
6.	Informan R	Distribusi bantuan RTG	Ketidakmerataan Bantuan RTG	Persepsi evaluasi	Informan menilai distribusi bantuan RTG belum

		Kurang sesuai karena ada beberapa masyarakat yang mengeluh tentang RTG tidak semua dapat”		dan Kegagalan	merata dan belum memenuhi harapan masyarakat secara keseluruhan.
7.	Informan R.A	Distribusi bantuan RTG tidak sesuai dengan harapan masyarakat.	Ketidaksesuaian Bantuan RTG	Persepsi Kegagalan	Informan menilai distribusi bantuan RTG belum sesuai dengan harapan masyarakat.
8.	Informan SG	“Ya, penanganan berjalan tetapi sangat lambat dan banyak persoalan di lapangan”	Penanganan Lambat dan Bermasalah	Persepsi harapan yang tidak terpenuhi	Kekalahan petahana dinilai dipengaruhi lambatnya penanganan bantuan perumahan dan bantuan sosial korban bencana.
9.	Informan S	Belum efektif, karena banyak ditemukan kekeliruan dalam proses pendataan jenis kerusakan, rusak menjadi sedang, sedang menjadi rusak berat dan ringan.	Kesalahan Pendataan Kerusakan	Efektivitas Penanganan Bencana	Informan menilai penanganan gempa belum efektif akibat kekeliruan pendataan tingkat kerusakan rumah masyarakat.
10	Informan A	“Kekalahan Najmul-Suardi ditentukan kemampuan menyelesaikan persoalan bantuan...”	Ketidakpuasan Publik	Persepsi kegagalan penanganan bencana	Kekecewaan masyarakat terhadap pengelolaan bantuan dan proses rehabilitasi menjadi faktor kekalahan petahana.
11.	Informan D	“Kekalahan Najmul-Suardi dipengaruhi isu penanganan bencana RTG”	Evaluasi Kinerja Petahana	Persepsi Kegagalan	Ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan RTG dan distribusi JADUP menjadi

					faktor utama kekalahan petahana dalam Pilkada 2020.
12.	Informna G	“Salah satu faktor kekalahan karena adanya kasus dilaporkannya orang yang mengkritik ketidakhadiran beliau ketika masa gempa.”	Kritik terhadap petahana	Persepsi Kinerja Petahana	Ketidakhadiran petahana saat masa gempa menjadi salah satu faktor penurunan dukungan politik.
13	Informan M	“Kemampaun dalam mengelola penanganan bencana masih tetap tidak berhasil, banyak yang kurang.”	Ketidakpuasan terhadap petahana	Persepsi Kinerja Petahana	Kekalahan petahana dipersepsikan dipengaruhi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan bantuan gempa dan JADUP.
14	Informan D	“Kekalahan Najmul-Suardi ditunggangi isu bencana sehingga masyarakat terpengaruh.”	Pengaruh isu bencana	Persepsi Kinerja Petahana	Isu penanganan bencana dianggap mempengaruhi persepsi masyarakat dan berdampak pada kekalahan petahana.
15	Informan A	“Isu Penanganan bencana merupakan isu yang diangkat sebagai senjata politik lawannya.”	Isu bencana sebagai strategi politik	Persepsi Kinerja Petahana	Isu penanganan bencana dipandang dimanfaatkan lawan politik untuk melemahkan petahana pada Pilkada 2020.
16	Infroman A	“Menjadi alat politik pasangan calon meskipun tidak secara langsung.”	Politisasi bantuan	Netralitas Bantuan Sosial	Bantuan pemerintah dipersepsikan memiliki muatan politik meskipun tidak dilakukan secara terang-terangan.

17	Informan G	“Kekalahan Petahana karena kurangnya koordinasi dan turun ke organisasi sendiri, NWDI.”	Kurangnya koordinasi politik	Persepsi Kinerja Petahana	Kekalahan petahana dipersepsikan dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi politik dan organisasi pendukung.
18	Informan F	“Jaminan Hidup dan RTG yang dijanjikan belum direalisasikan.”	Janji JADUP dan RTG tidak terealisasi	Persepsi Kinerja Petahana	Kekalahan petahana dipersepsikan dipengaruhi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap realisasi bantuan JADUP dan RTG
19	Informan S	“Mereka memilih pasangan lain yang lebih menjanjikan bantuan.”	Janji bantuan mempengaruhi pilihan	Pengaruh Bantuan terhadap Politik	Janji bantuan dari pasangan lain menjadi faktor yang mempengaruhi perpindahan dukungan politik masyarakat.
20	Informan H	“Isu RTG belum merata dan lambannya penanganan Covid-19.”	Isu bantuan dan pandemi	Persepsi Kinerja Petahana	Ketidakmerataan RTG dan lambannya penanganan Covid-19 dipersepsikan menjadi faktor kekalahan petahana.
21	Informan M	“Isu penanganan bencana yang tidak merata digoreng saat kampanye.”	Isu bantuan sebagai kampanye	Persepsi Kinerja Petahana	Ketidakmerataan bantuan RTG dan JADUP dijadikan isu politik yang mempengaruhi kekalahan petahana.
22	Informan M.M	Kekalahan petahana di sebabkan oleh persepsi publik terhadap kegagalan dalam penanganan urusan kebencanaan	Pengaruh kinerja petahana	Persepsi Kinerja Petahana	Kekalahan petahana dipersepsikan terkait kinerja dalam penanganan bencana dan pandemi.

		dan Pandemi Covid 19			
23	Informan W	“Isu RTG dan JADUP jadi senjata politik lawan.”	Isu kebencanaan politisasi	Persepsi Kinerja Petahana	Isu bantuan bencana digunakan dalam kampanye politik dan memengaruhi persepsi publik.
24	Informan H	“Isu RTG dan JADUP menjadi topik utama kampanye para kandidat terutama petahana yang dianggap gagal dalam menangani persoalan bantuan	Politisasi isu bencana	Persepsi Kegagalan Petahana	Isu bantuan bencana digunakan sebagai alat politik untuk menumbangkan petahana pada Pilkada 2020.

Sumber: Hasil Koding Data Penelitian, 2026.

Berdasarkan hasil koding data wawancara dengan berbagai informan penelitian yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa isu penanganan bencana menjadi persepsi kinerja petahana yang dianggap gagal dalam menyelesaikan persoalan RTG dan JADUP sehingga berdampak pada rusaknya kekayaan elektoral petahana Pasangan NADI Pilkada Lombok Utara 2020. Tata kelola bencana menjadi isu politik yang sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam pertarungan kontestasi kandidat. Pasangan Djohan-Dany menjadikan isu penanganan bencana yang masih belum terselesaikan dengan maksimal menjelang pemilihan sebagai senjata untuk menyerang petahana. Kinerja yang dianggap lamban dan tidak efektif terus dieksploitasi sebagai informasi kegagalan pemerintah/petahana dalam penanganan bencana.

Kekalahan petahana pada Lombok Utara 2020 dipengaruhi oleh ketidakmampuan pasangan Calon Najmul-Suardi dalam mengelola situasi menjadi peluang memenangkan kontestasi politik di daerah, namun justru menjadi batu sandungan untuk mempertahankan kekuasaan. Belum realisasinya Rumah Tahan Gempa (RTG) dan Jaminan Hidup (JADUP) yang dijanjikan oleh pemerintah merupakan salah satu faktor dominan masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kinerja petahana selama memimpin pada situasi krisis atau pasca bencana alam gempa bumi pada 2018 silam. Belum terbangunnya komunikasi politik yang maksimal dengan masyarakat oleh petahana merupakan salah satu faktor penyebab tumbang petahana, proses realisasi bantuan yang dianggap berhasil oleh pemerintah ternyata belum sepenuhnya mampu dipahami oleh masyarakat dikarenakan proses teknis penyaluran bantuan membutuhkan mekanisme yang Panjang hal ini menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Politisasi Birokrasi Pada Situasi yang dilakukan oleh petahana tidak berdasarkan prinsip-prinsip *Merit System* sehingga berdampak terhadap kepercayaan publik pada petahana, kondisi ini dijadikan sebagai bahan kampanye oleh pasangan calon lawan untuk menyerang secara terbuka. Kemampuan manajemen konflik petahana belum mampu meredam masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan secara merata hal hasil faktor ini menjadi masyarakat beralih dukungan kepada calon lainnya.

5.1.3 Sinergi Negatif Electoral: Konvergensi Kendala Struktural Pusat dan Kendala Operasional Daerah Dalam Runtuhnya Legitimasi Petahana

Kekalahan petahana Najmul-Suardi pada perhelatan Pilkada Lombok Utara 2020 menunjukkan fenomena yang kompleks dengan memadukan aspek struktural kewenangan pemerintah pusat dengan aspek operasional pemerintah daerah.

Meskipun literatur retrospeksi tradisional selalu mengasumsikan adanya perhitungan secara kedalaman rasional masyarakat dalam melihat kinerja pemerintah atau pejabat petahana pada masa krisis pemulihan pasca bencana (*attentive retrospection*) Healy dan Malhotra (2009), Gasver dan River, 2011, Fokumuto (2004), hingga (Taheri, 2025). Dalam konteks pilkada Lombok Utara kendala struktural pada keterbatasan dan keterlambatan dukungan anggaran pemerintah pusat justru menimbulkan efek domino tata kelola di daerah. Ujian harmonisasi dan keseimbangan administrasi penanganan di daerah mencakup beberapa hal yang bersifat fundamendal yaitu: keterlambatan pembangunan rumah tahan gempa dan penyaluran bantuan jaminan hidup, sengketa data perumahan, keterbatssan tenaga fasililator, kualitas bangunan perumahan tidak sesuai, system pengawasan yang belum maksimal, adanya oknum penyedia barang tidak menuntaskan pekerjaan pembangunan rumah, serta daerah mengalami defisit anggaran.

Namun, di sisi lain dalam penelitian ini juga menemukan bahwa munculnya dominasi *Blind Retrospection* (Achen dan Bartels, 2016), Morvan, (2024), bahwa peristiwa bencana alam secara singnifikan dapat menurunkan peluang untuk terpilih kembali dalam kontestasi meskipun jangkauan tersebut terbelenggu oleh kekuasaan kewenangan yang terbatas. Kewenangan yang berada pada luar arena pemerintah daerah justru menjadi tantangan terbesar keluar dari tekanan publik yang semakin memuncak. Dominasi struktur anggaran penanganan bencana berada sepenuhnya pada kewenangan pemerintah pusat, proses pendataan melalui mekanisme birokratis yang berlapis, ekskusi dana stimulan RTG dan JADUP membutuhkan perubahan regulasi dan SOP yang ketat serta pemblokiran dana yang bertahap

berdampak pada terhambatnya pembangunan dan distribusi bantuan sosial pada korban bencana di daerah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat integrasi faktual antara *Misattributed Blink Retrospection* dan *Negative Mindful Retrospection* dalam kasus tumbangnya petahana NADI pada Pilkada Lombok Utara 2020. Kekalahan petahana NADI tidak dapat dikotomi pada satu kendala secara terpisah melainkan harus diletakan pada satu kesatuan yang saling berdampingan. Kegagalan sistemik struktural nasional menjadi pemicu gelombang kekecewaan publik terhadap kinerja operasional birokrasi pada akar rumpu di bawah. Meskipun secara teoritis kajian mengenai perilaku pemilih dalam keadaan pasca bencana memunculkan ketegangan konseptual tetapi dapat dijelaskan melalui mekanisme atribusi lokal atau di sebut sebagai *local proxy attribution*. Dalam padangan publik tidak melakukan pemisahan secara kewenangan teknokratis maupun secara administrasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Penderitaan dan rasa trauma yang berkepanjangan direspon dengan memberikan penghukuman (*blink punishment*) pada petahana atas kompleksitas penderitaan yang dirasakan dibebankan kepada petahana daerah yang dianggap sebagai bagian dari kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Masyarakat tidak memahami secara asimetris kekuasaan antara pusat dan daerah tetapi beban kesalahan distribusikan kepada kepala daerah atas mandeknya kebijakan yang sesungguhnya bersifat sentralistis pada pemerintah pusat.

Runtuhnya kekuatan elektoral petahana pada Pilkada Lombok Utara tahun 2020 merupakan sebuah fenomena sosiopolitik yang langka dalam melihat perilaku pemilih pada situasi krisis yaitu pertemuan antara *Misattributed Blink*

Retrospection (bisa kognitif makro pemilih) dengan *Negative Mindful Retrospection* (alienasi birokrasi mikro lapangan). Penyatuan kedua arus negatif inilah menjadi katalisator utama amuk elektoral publik pasca bencana terhadap petahana NADI sehingga mengalami kekalahan. Konvergensi struktural dan operasional sangat menentukan runtuhnya legitimasi petahana pada kontestasi kekuasaan pada situasi krisis meskipun hanya bersifat jangka pendek. Dinamika pemilu dan bencana menyajikan temuan secara terpisah, retrospeksi buta dan retrospeksi penuh perhatian negatif, temuan baru ini mematahkan determinasi politik klasik yang memperhitungkan pemilih memberikan penghukuman kepada kandidat petahana karena aspek bencana geologis ataupun aspek lainnya seperti nilai ekonomi. Temuan disertasi ini justru menunjukkan hasil sebaliknya yaitu teori “*Retrospektive Multiplication effect Theory*” (Teori Efek Multiplikasi Retrospektif) ini membuktikan bahwa adanya efek platuk ganda (*dual-trigger effect*) di mana kegagalan manajemen struktural pusat diamplifikasi secara destruktif oleh operasional birokrasi daerah yang tidak berjalan maksimal karena berbagai kendala teknis dilapangan.

5.3 Persepsi Harapan yang Tidak Terpenuhi

Progres masa peralihan penanganan bencana terus mengalami kuantitas yang berdasarkan data penerima RTG dari waktu ke waktu mengalami peningkatan secara kuantitas meskipun tidak sesuai dengan harapan sebelumnya bahwa distribusi RTG seharusnya diselesaikan sesuai dengan waktunya seperti yang tertuang di dalam dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain isu perumahan, realisasi bantuan sosial jaminan hidup bagi korban di Lombok Utara tidak berjalan

secara merata serta munculnya ketidakpastian dari pemerintah berdampak terhadap kepercayaan dan ketidakpuasan dari masyarakat.

Penyelesaian penanganan pasca bencana sesuai dengan apa yang menjadi harapan pada masa transisi rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah daerah ternyata belum sepenuhnya dapat terealisasi dengan maksimal. Terutama terkait dengan Pembangunan fisik perumahan tahan gempa (RTG) dan bantuan sosial berupa jaminan hidup bagi warga masyarakat yang terdampak. Kedua isu ini menjadi strategis di tengah daerah yang melaksanakan kontestasi pada masa transisi pemulihan. Seperti apa yang dijelaskan oleh para peneliti sebelumnya, bahwa situasi dapat memberikan dua analisis secara terpisah yaitu, situasi dapat memperkuat *elektoral* petahana atau justru memperlemah *elektoral* petahana pada kontestasi di daerah.

Dalam situasi KLU, idealnya pasangan petahana harusnya mampu menjadikan situasi masa pemulihan menjadi peluang untuk memperkuat elektoral dengan memaksimalkan daya dukung yang dimiliki yang begitu besar, baik itu dengan posisi sebagai petahana dengan menggunakan instrumen birokrasi secara penuh untuk mendapatkan dukungan publik, serta kekuatan partai pendukung dengan jumlah kursi mayoritas di parlemen tentunya akan lebih mudah untuk melakukan akselerasi terhadap proses pemulihan pasca. Selain konteks bencana secara daya dukung politik, perannya sebagai orang kuat lokal dari perspektif ideologi dan ketokohan sebagai modal sosial yang sangat besar untuk memenangkan kontestasi pada Lombok Utara 2020. Namun fakta menunjukan bahwa pasangan Najmul-Suardi sebagai petahana mengalami kekalahan yang cukup telak dengan sebaran suara hanya mampu menang di basis suaranya di

Kecamatan pemenang sedangkan di 4 Kecamatan lainnya, Bayan, Kayangan, Gangga dan Kecamatan Tanjung mengalami kekalahan.

Transisi masa pemulihan di lapangan banyak ditemukan oknum pada proses distribusi bantuan RTG yang membuat masyarakat geram dan melemparkan kesalahan tersebut pada petahana. Pengelolaan distribusi bantuan, pemulihan kondisi psikososial masyarakat, serta pembangunan kembali fasilitas dan sarana-prasarana pelayanan publik, tidak mampu dilakukan secara tanggap dan menyeluruh. Masyarakat akar rumput melihat tata kelola yang dilakukan petahana belum memenuhi ekspektasi publik justru kecewa terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan RTG di beberapa wilayah masih belum selesai sampai saat ini. Kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan lainnya seperti JADUP, Beras, dan pakaian dan sebagainya juga tersebar di banyak tempat. Kelompok-kelompok masyarakat yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan bantuan inilah yang kemudian terlibat aktif dalam menyuarakan kegagalan petahana serta mendukung sekaligus gencar kampanye untuk kandidat lain. Pernyataan dari relawan-relawan NADI, kelompok-kelompok yang ini tidak dapat mereka bendung, meskipun dilawan dengan memaparkan data serta bukti-bukti keberhasilan atau penghargaan yang diperoleh petahana dalam hal pengelolaan pasca bencana.

Selain persoalan teknis yang menjadi kendala dalam masa pemulihan adalah belum jelasnya regulasi yang mengatur terkait dengan penggunaan dana siap pakai (DSP) dari BNPBD. Kondisi tersebut tentunya berdampak pada persepsi publik yang negatif terhadap kinerja pemerintah daerah yang terkesan lapan dan tidak serius dalam melakukan penanganan masa pemulihan pasca bencana di Lombok

Utara. Kendala regulasi tersebut menjadi diluar kendali dan kewenangan pemerintah daerah sehingga menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat terutama BNPB nasional. Dalam penanganan masa transisi bencana selain mempertimbangkan struktur bageting, sumber daya manusia diperlukan payung hukum yang jelas untuk penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) (BNPB dan USAID, 2018).

Regulasi yang belum jelas terkait dengan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) berdampak kepada pemblokiran penggunaan penanganan bencana ditengah kebutuhan korban bencana yang sangat mendesak. Kondisi tersebut semakin menambah harapan pemerintah daerah untuk menuntaskan distribusi bantuan yang merata menjadi terkendala. Berbagai persoalan yang muncul dalam penanganan bencana di Lombok Utara betul-betul diluar kendali pemerintah secara tufoksi dan kewenangan.

Dalam penjelasan yang disampaikan oleh pihak BNPB Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam ([ps://bpbd.ntbprov.go.id/post/](https://bpbd.ntbprov.go.id/post/)):

“Pemblokiran pencairan dana stimulan korban gempa dilakukan beberapa kali oleh pemerintah dengan berbagai pertimbangan teknis maupun non teknis. Ihtiar pemerintah daerah membuahkan hasil yang mengembirakan bagi warga dengan persetujuan di bukannya blokir Dana Siap Pakai Daerah Lombok Utara.

Wujud keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan pemberian dana secara langsung kepada penyintas bencana 2018 tertuang dalam perubahan Peraturan Menteri Sosial No 4 tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Tunai bagi korban bencana menjadi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 yang dikeluarkan pertanggal 17 September 2020. Terdapat beberapa pokok urgensi dari perubahan peraturan tersebut yang termuat pada pasal 11 yang dengan

jelas menerangkan dan mengatur syarat bagi warga masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial jaminan hidup yang biasa disebut warga sebagai Dana JADUP. Berdasarkan pada perubahan tersebut jadup sudah pasti akan di cairkankan pada bulan november pada tahun 2020, sebelum tahapan pemilihan akan dilakukan.

Statement Faisal selaku, *Kepala Dinsos P3A Lombok Utara, 2020, pada media Radar Lombok (<https://radarlombok.co.id> diakses pada tanggal 27/05/2026 pukul 14:32*

“Bahwa Peraturan Mensos memang menjadi halangan selama dua tahun terakhir, dimana pada pasal sebelumnya jadup bisa dicairkan apabila status tanggap darurat dicabut, sementara pada kondisi sekarang status tanggap darurat kerap diperpanjang seiring pembangunan bantuan rumah tahan gempa (RTG) dituntaskan, sementara warga sudah berhenti tinggal pada hunian sementara. Oleh karena itu, atas inisiatif dari Bupati Lombok Utara langsung menghadap ke Kemensos pada bulan Agustus 2020 mengusulkan perubahan Peraturan Mensos tersebut, sehingga terbitlah Peraturan Mensos baru tersebut. Khusus pada Pasal 11 diubah kriteria penerima jadup menjadi penerima merupakan masyarakat/korban bencana, selama masih tinggal di hunian sementara atau hunian tetap, diberikan dalam kondisi keadaan darurat yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan atau pascabencana, diberikan kepada korban secara individu melalui kepala keluarga.” Jumlah penerima jadup yang diusulkan sebanyak 37.777 KK atau 121.286 jiwa, dengan nominal diterima Rp 10 ribu perhari selama 30 hari, totalnya Rp 300 ribu per jiwa, mereka menerima selama sebulan dikalikan dengan jumlah keluarganya. Penerima tahap pertama ini diprioritaskan kepada korban gempa yang rusak berat, untuk rusak ringan dan sedang menyusul pada awal tahun 2021, anggaran sudah masuk dalam APBN 2021. Pemberian jadup yang awalnya Rp 600 ribu selama tiga bulan menjadi Rp 300 ribu selama sebulan mengingat kondisi keuangan negara pada masa pandemi covid-19. Nanti uang yang mereka langsung masuk ke rekening BNI yang sudah dibuatkan pada saat pengusulan ke Kemensos.

Pemerintah daerah sangat serius untuk menangani persoalan Perumahan rakyat dan bantuan langsung tunai berupa jaminan hidup kepada korban bencana

gempa bumi dengan mendorong pemerintah pusat untuk segera mungkin mendistribusikan bantuan termasuk batuan langsung tunai dengan harapan warga masyarakat korban bencana dapat hidup sejahtera di tengah kondisi yang serba sulit. Himbauan dan komunikasi terus dilakukan oleh pemerintah daerah guna memperlancar proses pendistribusian bantuan kepada masyarakat di daerah. Keterlambatan dari sisi teknis terhadap pemberian bantuan ke masyarakat menimbulkan stigma negatif kepada pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah terkesan lamban dan tidak mampu menyelesaikan persoalan bantuan perumahan RTG dan JADUP yang menjadi hak masyarakat korban bencana.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Lombok Utara, M. Zaldi Rahardian ST dalam (<https://radarntb.com>) diakses pada Jum'at 29 Mei 2026 Pukul, 09;2026, berikut kutipan statmennya:

“Sisa pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) Pemkab melalui BPBD sedang menyiapkan mekanisme proses yang harus dilakukan. kendala dalam pembangunan RTG di Lombok Utara, masih terkendala dengan dana dari Pusat bukan dari Kabupaten. Pemerintah daerah melalui BPBD terus melakukan koordinasi dan konsultasi terkait dengan persyaratan pendukung.

Perdebatan isu penanganan tidak hanya pada level praktis di lapangan namun juga menjadi adu argumentasi pada sisi konseptual yaitu visi dan misi masing-masing pasangan calon baik itu Najmul-Suardi maupun Djohan-Dany. Menawarkan berbagai kebijakan dan program pada situasi masa transisi pemulihan tentunya menjadi aspek yang strategis guna merebut hati dan suara masyarakat korban. Ruang perdebatan pasangan petahana dan penantang pada saat debat terbuka pada sesi 1 dan 2 menunjukkan bahwa isu penanganan menjadi topik

utama oleh kedua kandidat. berikut dapat dilihat hasil perdebatan kandidat pada acara debat terbuka pada, Sabtu 28 November, 2020:

Pernyataan Pasangan Najmul- Suardi, pada saat debat 2020, Sabtu 28 November, 2020:

Salah satu persoalan kita saat ini adalah pemulihan pasca bencana, maka tentu kita harus berani melakukan langkah-langkah yang bisa mempercepat penyelesaian persoalan-persoalan kita. saya ingin bertanya kira-kira apa yang Bapak lakukan saya bicara manajemen bencana, kira-kira deskripsi manajemen yang akan Bapak kembangkan itu berkaitan dengan sustainable development, karena ini menjadi tanggung jawab kita sebagai kepala, daerah, supaya persoalan yang berkaitan dengan pemulihan ini dapat terselesaikan.

“Tidak ada hal-hal yang di lapangan misalnya, rumah rusak ringan lalu dibiayai dengan rusak berat tidak mungkin itu terjadi, proses pembangunan perumahan diawasi dalam melaksanakan apa pembangunan masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa kita diawasi dengan ketat, ada kejaksan ada macam-macam, sehingga kita tidak mungkin menjerumuskan diri kita untuk melakukan hal-hal yang justru merugikan diri kita sendiri. Saya sekali lagi menyampaikan kepada bapak mari berpandangan positif, tidak baik kemudian kita menyampaikan kepada itu misalnya harus dia memilih pasangan calon tertentu walaupun ada seperti ini saya tidak tahu pasangan calon mana yang akan di apa yang ditawarkan seperti itu kalau pasangan calon Saya tidak tadi yang kami tanyakan adalah bagaimana bapak membangun sistem manajemen yang baik yang berorientasi kepada sesama development pasca gempa”.

Pernyataan Pasangan Djohan-Dany, pada saat debat 2020, Sabtu 28 November, 2020:

Jadi memang harus kita lakukan apa yang harus diingat oleh rakyat salah satu adalah recovery atau pembangunan korban gempa yang terjadi sekarang ini kalau saya melihat di lapangan dengan pembangunan RTG ini rumah tahan gempa ini banyak hal yang tidak pas sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat namun hanya oleh penguasa saja kalau saya melihat di lapangan dan orang-orang mencari saya tidak paham dengan itu ada rumah-rumah yang rusak kita bangun ya sesuai dengan dana rusak berat tapi asal memilih salah satu Saya tidak punya kekuasaan tapi insya Allah kalau pasangan sudah Akbar ini saya rasa satu yang kita inginkan ke depan itu adalah menyelesaikan persoalan RTG ini lebih awal karena bagaimanapun juga ya kalau rakyat tidak punya rumah tentu menjadi persoalan bagi daerah.

Paling penting persoalan perumahan menjadi tugas kita bersama bagaimana kita segera memberikan kebutuhan rumah sebagai kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Lombok Utara. kami berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian di Kabupaten Lombok Utara, hal lain menjadi catatan kami bagaimana infrastruktur dasar jalan, infrastruktur kesehatan, pendidikan ini menjadi prioritas kita di dalam melakukan rehab mereka yang akan kita lakukan. Pembangunan RTG ini adalah dana-dana pusat ya memang dikelola kita di daerah, saya melihat seperti itu dan saya mendengar seperti itu banyak orang yang mengatakan seperti itu kepada saya ini yang terjadi nah itulah sebabnya supaya kita sampaikan dalam forum ini supaya kita ada keterbukaan di dalam mengelola keuangan negara yang dipercayakan kepada kita yang ada di daerah.

Fakta kekalahan petahana Najmul-Suardi menunjukan bahwa persepsi harapan yang tidak terpenuhi berkaitan dengan penanganan bencana yang menjadi isu strategis pada 2020 yang tidak terbantahkan di tengah kekuatan dan modal sosial petahana yang begitu besar. Proses penanganan pasca bencana tidak sesuai dengan harapan publik mengakibatkan tergerusnya dukungan politik petahana.

H. Suardi selalu Calon Wakil Bupati Pasangan NADI, Pada tanggal 17 Januari, 2025. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan Pasangan NADI. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor eksternal, yakni pada penilaian masyarakat terhadap distribusi RTG serta isu terkait bencana lainnya. H. Suardi menyatakan bahwa terdapat masyarakat yang belum mendapatkan RTG serta kerumitan perihal administrasi pengurusan pembangunan RTG. Pemerintah daerah pada posisi sangat kesulitan dalam melakukan pendataan. Sedangkan pemerintah daerah untuk melakukan distribusi bantuan RTG. Termasuk soal JADUP, masih lebih banyak jumlah masyarakat yang belum menerima disebabkan oleh data yang tidak jelas.

Pernyataan H. Suardi selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Ketua Koalisi Partai Pengusung Fajar Marta, berikut petikan hasil wawancaranya:

“Saya melihat distribusi bantuan kepada Masyarakat bermasalah karena akurasi data dan sistem yang kurang tepat. Kemudian faktor internal yang

muncul ialah perihal partai pengusung yang tidak bekerja dengan maksimal serta pemilihan wakil yang bukan dari partai politik menyebabkan antusias Masyarakat untuk membela pasangan tersebut sangat kurang. Ketua Koalisi Partai Pengusung yang sekaligus menjadi Ketua Tim Pemenangan memberikan pernyataan yang tidak hanya mencakup faktor eksternal. Namun, terdapat faktor internal yang muncul berdasarkan fakta yang dihadapi. Adapun faktor eksternal yang diterangkan dengan gamblang bahwa kekalahan Pasangan NADI yang merupakan petahana pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 adalah disebabkan karena isu bencana. Petahana dianggap gagal dalam melakukan penanganan pasca bencana.

Hasil wawancara di atas diperkuat dengan Pernyataan dari hasil wawancara dengan Relawan Pasangan Calon Najmul-Suardi, dengan Suryadi Desa Medana Kecamatan Tanjung Lombok Utara, berikut petikan hasil wawancaranya:

“Isu terkait dengan perumahan tahan gempa dalam hal ini banyak yang menyebutnya RTG menjadi salah satu modal untuk menyerang petahana dalam hal ini Pasangan Najmul dan Suardi, meskipun berbagai daya upaya yang dilakukan oleh Tim termasuk relawan untuk menangkis isu kegagalan penanganan bencana oleh petahana, termasuk menyajikan data oleh tim pasangan calon NADI”.

Adapun relawan yang bertugas untuk mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya kepada Pasangan NADI menyatakan bahwa kekalahan petahana tersebut disebabkan karena isu bencana. Isu terkait RTG dan JADUP belum selesai secara prosedural bahkan pada tahap pendistribusian banyak mengalami kendala di lapangan. Termasuk distribusi RTG yang tidak sesuai dengan harapan Masyarakat. terdapat aplikator-aplikator yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga terdapat juga Pembangunan RTG kelompok masyarakat yang tidak terbangun utuh sesuai dengan harapan.

Namun, tidak hanya faktor eksternal tersebut yang dominan menjadi penyebab kekalahan Pasangan NADI, tetapi juga kekalahan karena munculnya perpecahan di dalam tim Najmul-Suardi juga disinyalir menjadi faktor lainnya.

Faktor internal tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap militansi tim relawan untuk dapat terarah dan dikendalikan. Kedua faktor tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi tim Najmul-Suardi, di satu sisi berjuang melawan persoalan penanganan bencana yang banyak mengalami kendala terkait dengan teknis pembangunan RTG dan anggaran jaminan hidup bagi korban bencana yang masih dalam tahap awal yang jumlah penerimanya masih jauh dari jumlah yang diperkirakan. Adanya dua faktor internal dan eksternal menjadi hambatan pasangan Najmul-Suardi dalam pertarungan kontestasi Pilkada di Lombok Utara.

Progres masa pemulihan pasca bencana di Kabupaten Lombok Utara, sesungguhnya terus mengalami kenaikan secara positif jika mengacu pada Indeks Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Berdasarkan pada penilaian RRRP Indonesia tahun 2023 di Kabupaten Lombok Utara pada tahun ke-5 (T+5), nilai rata-rata indeks rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana mencapai 93,57% naik 17,27% dari rata-rata nilai indeks pada tahun 2018 dan belum melampaui nilai *baseline* atau indeks pada tahun sebelum (T-1) dan dikatakan belum pulih. Nilai IRRP pada masing-masing sektor pada tahun ke 5 (2023) dibandingkan pada tahun terjadi (T0/2018) meliputi sektor permukiman dengan nilai 88,25% naik 24,81% sektor infrastruktur mencapai 93,8% naik 18,51%, sektor sosial mencapai 94,73% naik 13,58%, sektor ekonomi mencapai 95,83% naik 13,19% dan lintas sektor mencapai 95,26% naik 16,19%.

Table.5.7

Kenaikan Indeks Rehab/Rekon Lombok Utara Tahun 2023..

Sektor	Nilai IRRP Per-Tahun (%)							Kenaikan 2018-2023 (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Permukiman	100	63.44	68.51	78.25	84.87	85.97	88.25	24.81
Infrastruktur	100	75.29	79.92	84.7	89.17	91.81	93.8	18.51
Sosial	100	81.15	82.12	86.94	92.36	93.8	94.73	13.58
Ekonomi	100	82.64	81.47	88.48	94.16	95.49	95.83	13.19
Lintas Sektor	100	79.07	81.95	88.37	93.4	93.95	95.26	16.19
Rata-Rata Kenaikan Semua Sektor 2018-2023								17.26

Summer: BNPB Tahun 2023.

Dari uraian nilai IRRP di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2023, disimpulkan bahwa kenaikan rata-rata IRRP di seluruh sektor mencapai 17,26%. Dengan status yang belum pulih berdasarkan nilai rata-rata IRRP Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2023, perlu diperhatikan bahwa semua sektor memiliki nilai di bawah 100%. Maka dari itu perlu upaya-upaya khusus untuk meningkatkan kondisi seluruh sektor dengan program peningkatan pemulihan masyarakat yang menjadi korban supaya tetap melakukan proses penanganan yang bersifat berkelanjutan oleh seluruh pihak dan multi pihak lainnya.

5.4 Konfigurasi Dua Krisis: Kompleksitas Pemulihan Pasca Bencana-Gempa 2018 di Tengah Pandemi Covid-19 Tumbangkan Petahana.

Masa transisi pemulihan pasca bencana gempa bumi Lombok Utara dilakukan bersamaan dengan Pandemi Covid 19 yang menjadi kendala besar serta

memperlambat proses masa rehabilitasi dan rekonstruksi dilapangan. Meskipun kondisi anggaran pemerintah banyak yang di recopusing namun untuk transper Dana stimulan Rumah Tahan Gempa (RTG) aman dari recopusing. Dana stimulan sebesar Rp 2,07 Triliun untuk Lombok Utara pada tahun 2019 yang dikirim langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat ke rekening BPBD dan kelompok masyarakat melalui Pokmas. Dana pembangunan kembali perumahan tidak mengalami pemotongan untuk pandemi Covid-19 namun berdampak terhadap proses pengerjaan fisik yang mengalami keterlambatan dikarenakan kebijakan pembatasan sosial beraktivitas masyarakat (*Lockdwon/PPKM*). Muhadi selaku Kepala Pelaksana BPBD Lombok Utara, menyebutkan bahwa dari total dana siap pakai untuk stimulan rumah rusak yang sudah di transfer pemerintah pusat, ada yang sudah terdebit ke rekening kelompok masyarakat senilai Rp. 169, 786 Miliar dengan rincian rusak berat Rp 162,400 miliar, rusak sedang sebesar RP 5,62 Miliar dan kategori rusak ringan Rp 1,76 Miliar. Sementara dana yang masih ada di rekening masyarakat dan belum terdebit ke rekening kelompok masyarakat atau Pokmas sebesar Rp. 1,90 Triliun hingga Maret 2019 (<https://www.antaranews.com>)

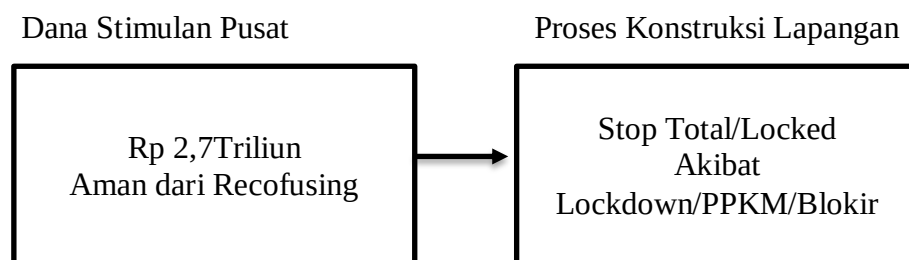
Sarifudin selaku Plt Bupati Lombok Utara, dengan memperhatikan perkembangan pelaksanaan APBD tahun 2020, dalam perencanaan sebelumnya bahwa Pemkab Lombok Utara disamping melaksanakan program-program prioritas, juga berkonsentrasi melaksanakan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak gempa bumi tahun 2018. Dalam Perjalanan APBD 2020 triwulan pertama realisasi anggaran daerah melakukan penyesuaian dan pergeseran anggaran sebagai bentuk kepatuhan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Sejalan

dengan antisipasi mewabahnya corona virus disease 2019 (Covid-19) (<https://mataram.antaranews.com>). Belanja Pemkab Lombok Utara tahun 2020 untuk mendukung hal seperti percepatan pembangunan ketangguhan terhadap bencana dan mempertahankan daya lingkungan. Kemudian, percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pasca bencana.

Dinamika penanganan bencana Lombok Utara mengalami konfigurasi dua krisis yang menimbulkan kompleksitas yang menguat yaitu pemulihan pasca bencana gempa bumi 2018 serta Pandemi Covid-19. Pertemuan dua krisis ini menimbulkan kompleksitas yang sangat luar biasa melumpuhkan ruang fiskal pemerintah daerah sekaligus berdampak pada proses masa rekonstruksi pembangunan rumah tahan gempa. Secara langsung konfigurasi ini menciptakan paradoks birokrasi dan operasional pada program utama pemulihan permukiman warga masyarakat meskipun dana stimulan tidak mengalami pergeseran namun berdampak pada proses rekonstruksi lapangan.

Gambar 5.3

Dana Stimulan Pusat



Sumber: Di olah dari berbagai sumber, 2026

Struktur anggaran penanganan bencana gempa bumi Lombok Utara tidak mengalami pergeseran dampak dari Pandemi Covid 19, namun demikian membuat administrasi menjadi terkunci. Dana stimulan Rp 2,07 triliun yang digelontorkan

oleh pemerintah pusat melalui kementerian BNPB untuk masa pemilihan masyarakat secara khusus di kunci dari pengalihan anggaran Pandemi Covid. Anggaran tersebut sempat mengalami pembekuan di rekening akibat proses verifikasi administrasi yang ketat karena dampak dari masa transisi Pandemi Covid 2019.

Kendati, dana stimulan dari BNPB tidak mengalami pergeseran anggaran seperti sektor yang lain, namun berdampak pada kelumpuhan operasional penanganan bencana di Lombok Utara, kebijakan pembatasan sosial memutus rantai distribusi bahan bangunan yang terbuat dari panel konvensional yang merupakan salah satu jenis rumah yang diminati warga masyarakat sebagai bahan bangunan. Mobilitas dan aktivitas Tim Fasilitator yang bekerja di lapangan sebagai pendamping kelompok masyarakat menjadi terhenti karena kebijakan *Lockdwon Pandemi Covid 19*, yang memaksa banyak masyarakat menetap di hunian sementara yang sudah mengalami kerusakan permanen.

Konfigurasi krisis pasca bencana gempa bumi dan Pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi kompleksitas masa pemulihan di Lombok Utara, namun berimplikasi secara politik dengan terjadinya devaluasi kepercayaan kepada pemerintahan petahana NADI. Kompleksitas secara teknis penanganan bencana berubah menjadi persepsi kegagalan penanganan di pikiran publik. Masyarakat yang terdampak bencana sangat sulit untuk memisahkan hambatan akibat dari kondisi diluar kendali kewenangan pemerintah daerah dengan murni kegagalan tata kelola birokrasi daerah. Kekecewaan publik atas penanganan bencana yang mengalami keterlambatan terkait dengan sisa dana perumahan betul-betul dimanfaatkan oleh pasangan JODA sebagai senjata menyerang calon NADI pada

Pilkada KLU. Ketidakmampuan petahana keluar dari kondisi dua krisis bencana gempa bumi dan covid menjadi variabel pokok yang memicu menurunnya suara petahana yang berujung pada kekalahan petahana NADi pada perhelatan Pilkada KLU 2020.

Kekalahan petahana NADI pada Perhelatan Pilkada Lombok Utara pada tahun 2020 berdasarkan pada dampak krisis ganda yaitu gempa bumi 2018 dan Pandemi Covid-19. Kedua krisis tersebut tidak dapat dipisahkan secara dikotomi kedalam satu jenis bencana, namun keduanya saling berkaitan satu sama lain. Hasil rekapitulasi KPU menunjukkan bahwa kekalahan NADI dengan selisih cukup besar yakni dengan hanya prolehan suara 44,9% dibandingkan dengan Pasangan JODA sebesar 56,1% merupakan bukti bahwa kegagalan petahana disebabkan oleh efek dari krisis ganda. Mencuatnya isu kegagalan penanganan bencana merupakan lokomotif utama memicu kekecewaan publik terhadap kinerja petahana meskipun keterlambatan dan persoalan yang muncul terkait penanganan bencana bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sementara krisis yang diakibatkan dari pandemi Covid-19 sebagai daya dukung utama yang meledakan penurunan kepercayaan politik petahana.

5.5 Transformasi Struktur Kontestasi Politik Lokal Sebagai Amunisi Sesaat Tidak Mengubah Jaringan Patronase Secara Permanen.

Situasi krisis pada masa transisi pasca bencana digunakan sebagai alat politik oleh para kandidat petahana dan penantang untuk mendapatkan simpati publik. Proses masa rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi isu sentral pada Pilkada 2020 di

Lombok Utara. Isu keterlambatan distribusi bantuan dari pemerintah pusat ke daerah serta munculnya persoalan teknis lapangan menjadi framing strategis pra kandidat untuk saling menjatuhkan menjelang pemilihan.

Peristiwa bencana gempa bumi pada tahun 2018 di Kabupaten Lombok Utara tidak mengubah tatanan struktur kekuasaan politik lokal petahana secara mendasar, tetapi menjadi alat penyulut kemarahan publik yang memicu hilangnya kepercayaan terhadap penguasa dalam penanganan bantuan perumahan kepada warga masyarakat. Bencana alam gempa bumi menjadi variabel utama kontestasi politik lokal di KLU meskipun hanya berlangsung sesaat tidak sampai pada mengubah peta sosial secara fundamental. Struktur sosial di Lombok Utara masih tetap berbasis pada patronase tradisional, kelompok jaringan serta berkiblat pada simpul tokoh-tokoh pemekaran daerah.

Tumbangnya petahana NADI pada Pilkada 2020 menunjukkan kekalahan yang bersifat sirkulatif bukan pada keruntuhan secara sistemik. Bukti empiris menunjukkan bahwa secara reveribilitas kemenangan kembali Najmul Akhyar pada periode selanjutnya Pilkada tahun 2024 dengan sangat jelas menegaskan bahwa basis dukungan strukturalnya tidak hancur oleh isu krisis penanganan bencana pada masa lalu. Kemenangan pasangan Najmul Akhyar dan Kusmalahadi Syamsuri pada perheletan Pilkada serentak pada tahun 2024 dengan prolehan suara 67.323 suara atau 45,18 persen dari total suara sah membuktikan bahwa narasi negatif atau terjadinya resistensi masa lalu tidak lagi berlaku di mata pemilih.

Kembalinya sosok Najmul Akhyar menjadi pemimpin hasil Pilkada 2024 di Lombok Utara menunjukkan bahwa modal sosialnya tidak mengalami keruntuhan

secara permanen. Jaringan *patronase* sebagai seorang Tuan Guru dan struktur kekuasaan tradisionalnya masih menjadi daya pengikat yang sangat kuat bagi para pemilih. Kekalahan pada Pilkada 2020 terjadi akibat terjadinya defisit elektoral sesaat oleh publik kepada petahana terhadap siklus penanganan bencana gempa bumi di KLU yang berada di luar kendali pemerintah berkaitan dengan regulasi, struktur anggaran, pembokiran dana stimulan bantuan gempa dan bantuan jaminan sosial. Persoalan tersebut diperkuat dengan proses pendataan di daerah yang mengalami berbagai persoalan yang kompleks, yang semua beban politik itu ditanggung oleh petahana.

5.6 Kegagalan Petahana NADI Mengkonversi dan Mengapitalisasi Sumber Daya Logistik Krisis Menjadi Insentif Elektoral Dalam Mengikat Kesetiaan Pemilih.

Kekuatan lokal dan politik *klientalisme*, petahana secara teoritis memiliki keunggulan komparatif raksasa (*incumbent advantage*) berupa penguasaan mesin birokrasi, otoritas anggaran, serta diskresi penyaluran bantuan sosial kemanusiaan kepada masyarakat sebagai penyintas bencana menjelang pemilu. Chen (2013), penyaluran bantuan pasca bencana menjelang pemilihan yang dilakukan oleh petahana merupakan sinyal positif yang mampu meningkatkan keyakinan pemilih bahwa petahana memiliki kepedulian yang utuh kepada publik dengan harapan di masa akan datang akan tetap memberikan bantuan. Bastos dan Miller (2013) deklarasi yang dilakukan oleh petahana untuk komitmen menyelesaikan isu penanganan bencana dapat memperkuat keuntungan elektoral bagi petahana. Taheri

(2006), bahwa situasi krisis pasca bencana terjadi dapat menciptakan keuntungan struktural bagi petahana dengan memanfaatkan situasi krisis. Aldrich (2011), bahwa tingkat kerusakan akibat bencana dapat mempengaruhi jangkauan jaringan para politisi menjangkau daerah yang terdampak bencana, semakin besar tingkat kerusakan semakin sering para politisi menjangkau jaringan yang lebih luas serta pemetaan aspek kebermanfaatan buat mereka secara politik.

Namun, situasi yang terjadi pada konteks Kabupaten Lombok Utara, berbanding terbalik di mana petahana mengalami kekalahan, berbeda dengan kajian sebelumnya yang menjadikan situasi bencana dapat meningkatkan elektabilitas politik petahana melalui distribusi bantuan yang dapat terkonversi dan terkapitasi menjadi sebuah keunggulan justru menjadi batu sandungan. Keberadaan sebagai petahana justru menjadi beban politik yang berat dalam penanganan pasca bencana yang dapat dipersepsikan sebagai sebuah kegagalan petahana.

Statmen kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei pada Kompas, 20 Desember 2018, 07:07 Wib, menyatakan bahwa:

“Bahwa fasilitator yang mendukung percepatan pembangunan rumah warga masih kurang. Karena persyaratannya adalah harus dibentuk atau di bantu oleh fasilitator. Berdasarkan data BNPB terdapat 803 orang fasilitator yang melakukan pendampingan untuk membangun rumah rusak berat sedangkan jumlah pendamping yang dibutuhkan sebanyak 1.700 orang. Sedangkan pendamping untuk rusak sedang dan ringan akan di rekrut oleh pemerintah daerah dan diajukan ke BNPB.

Garis waktu pemblokiran dana stimulan rumah tahan gempa di Kabupaten Lombok Utara melalui tiga tahapan yaitu awal pemblokiran dari bulan Agustus-September tahun 2018. Pemblokiran sementara yang dilakukan oleh BNPB untuk mengamankan uang negara karena saraba fisik yang di kelola melalui mekanisme

Pokmas, teknis fasilitator dan tata kelola administrasi bangunan di nilai belum matang. Tahapan pemblokiran kedua atau lanjutan dan evaluasi dari tahun 2019-2021, pemblokiran dilakukan terkait dengan adanya persoalan administrasi yang cukup panjang yang mengharuskan sebagian dana yang tersisa yang khususnya masuk pada SK Susulan tetap tertahan dalam status blokir bertahun-tahun sampai pada tahun 2021 sekitar Rp/117 miliar hingga Rp. 250 miliar masih berstatus terblokir pemerintah pusat.

Pertarungan politik dalam situasi bencana menjadi klaim pertarungan keberhasilan vs kegagalan menyelesaikan masa transisi pasca bencana yang terjadi di Lombok Utara. Kegagalan Petahana NADI Mengkonversi dan Mengapitalisasi Sumber Daya Logistik Krisis Menjadi Insentif Elektoral Dalam Mengikat Kesetian Pemilih disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

1. Masalah Dana Stimulan Rumah Tahan Gempa (RTG) dan Bantuan Jaminan Hidup Kepada Warga Korban Bencana yang belum terdistribusi dengan merata. Proses administrasi pendataan yang dinilai berbelit-belit menimbulkan diskriminasi sosial dintengah masyarakat.
2. Munculnya persoalan penanganan bencana yang berada di luar kendali pemerintah daerah/petahana, seperti: regulasi pusat dan terjadinya pemblokiran dana: aturan dari pihak Perbankan, mekanisme pencairan bertahap dari BNPB dan Kementerian Keuangan, serta pemblokiran rekening adalah sebuah kebijakan nasional.
3. Adanya beberapa kasus pemotongan dana bantuan RTG oleh para oknum dan adanya Aplikator yang membawa lari uang Kelompok Masyarakat

(Pokmas) di lapangan merusak reputasi kepemimpinan petahana NADI, meskipun kebijakan tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat.

4. Persepsi publik yang terbangun begitu kuat terhadap kegagalan penanganan bencana meruntuhkan kekuatan sumber daya logistik petahana.
5. Terdapat perbedaan pendapat soal kerusakan jenis rumah berdampak terhadap distribusi bantuan ke rekening kelompok masyarakat.
6. Jumlah Pokmas yang terbentuk belum memenuhi target terdapat 1.239 pokmas untuk rusak berat seharusnya terdapat 5.011 Pokmas untuk 75.138 rusak berat.
7. Keterbatasan material menjadi persoalan karena 65 persen warga masyarakat memilih rumah Rika yang berbahan dasar kayu.
8. Penderitaan warga masyarakat yang terlalu lama di kamp pengungsian menghilangkan rasionalitas bantuan yang terkedala oleh faktor sistemik kewenangan pemerintah pusat tetapi di limpahkan pada pemerintah daerah dalam hal ini petahana.

Kegagalan Petahana NADI Mengkonversi dan Mengapitalisasi Sumber Daya Logistik Krisis Menjadi Insentif Elektoral Dalam Mengikat Kesetiaan pemilih pada Pilkada Lombok Utara 2020, merupakan hambatan secara sistemik dan birokratis yang berada di luar jangkauan dan kendali secara langsung petahana, sehingga secara politik kondisi tersebut sangat merugikan posisi mereka sebagai calon petahana. Pemilih cenderung menyalahkan kepemimpinan kepala daerah atas semua persoalan yang berkaitan dengan distribusi bantuan perumahan tahan gempa maupun bantuan kaminan hidup bagi masyarakat.

5.7 Kegagalan *Counter-Framing* Petahana di Tengah Solidifikasi Kekecewaan Publik

Dalam perspektif komunikasi politik bencana adalah panggung kontestasi wacana di mana realitas obyektif sering kali kalah oleh realitas media (*Media Realty*). Kegagalan petahana mengkonversi keunggulan visibilitas media yang lebih jauh tinggi sebagai media komunikasi capaian pemulihan pasca bencana tidak dapat mengalahkan rasa kekecewaan publik (*public anger*) atas keterlambatan distribusi bantuan dilapangan sudah terlalu kuat sehingga membentuk kognitif bias yang kebal terhadap pembingkai positif petahana. Berbagai persoalan yang muncul baik itu pada level pemerintah pusat diantaranya: perubahan regulasi, struktur anggaran, terjadinya pemblokiran dana stimulan sampai pada proses verifikasi di daerah semua di bebaskan kepada petahana sebagai kepanjangan pemerintah pusat di daerah.

Kegagalan Petahana adalah oleh Failure Framing yang isinya adalah Public Anger terhadap keterlambatan atau tidak tuntasnya distribusi RTG dan JADUP. Karena faktanya memang ada yang belum dapat (meskipun jumlahnya lebih sedikit), dan yang sudah dapat (meskipun jumlahnya lebih banyak). Namun, masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan baik RTG maupun JADUP, hanya Diam, karena Merasa diri mereka saja yang mendapatkan, mereka tidak tau bahwa yang sudah mendapatkan bantuan itu jumlahnya lebih banyak daripada yang belum dapat (secara data). Bagi yang belum dapat, semuanya memusatkan kesalahan pada Pemda, karena perihal RTG dan JADUP dianggap sudah tuntas di tingkat Pusat tetapi gagal dieksekusi atau tidak diselesaikan oleh Pemda. Persepsi ini semakin dibangun oleh lawan petahana sehingga serangan di media menjadi semakin efektif.

Ketika Petahana berupaya menyampaikan keberhasilan Progress RTG yang hampir selesai dan JADUP yang sudah bisa direalisasikan, yang sebenarnya JADUP hanya boleh direalisasikan kalau perihal RTG sudah tuntas. Namun, Pesan tersebut berbenturan dengan berakhirnya masa jabatan petahana, sehingga proses yang belum tuntas itu tetap dianggap sebagai kegagalan sepenuhnya dari petahana.

Tim Petahana mengakui tidak mampu membalikkan opini serangan - serangan dari lawan. Narasi di media sosial terus mengarah kepada masyarakat yang memang faktanya belum dapat. Sementara keberhasilan - keberhasilan yang disampaikan itu terabaikan oleh masyarakat, dengan alasan memang benar ada yang belum dapat. Yang paling menyulitkan ialah bahwa Publik / Masyarakat tidak memahami apabila disampaikan tentang data, tentang persentase, jadi capaian yang disampaikan (yang berbasis data) tidak mampu meredam emosi dan kekecewaan Masyarakat. Faktor Penentu kalahnya Petahana adalah perang wacana di Media Sosial. Kekuatan framing lawan menyebabkan Kemarahan Publik, sehingga publik menjadi Kebal dari menerima apapun klarifikasi atau framing positif tentang capaian dari petahana.

5.8 Mengkonversi Kekecewaan Konstituan Menjadi Kesempatan Politik Bagi Pasangan JODA Pada Pilkada Lombok Utara 2020

Situasi bencana tidak selalu bermakna kesempatan bagi petahana yang identik dengan monopoli situasi untuk kepentingan dan melanggengkan kekuasaan dengan politisasi bencana untuk kesempatan mendapatkan dukungan politik petahana. Namun sebaliknya, kesempatan untuk menjadikan isu penanganan bencana

menjadi peluang justru dimanfaatkan oleh kandidat penantang JODA dengan mengevaluasi kinerja pemerintah yang belum optimal dalam penanganan bencana.

Kekecewaan konstituen terhadap kinerja petahana dalam proses penanganan bencana justru menjadi kemarahan publik yang berimplikasi terhadap dukungan politik petahana semakin menurun. Kandidat JODA menjadikan situasi kegagalan penanganan bencana menjadi kesempatan politik untuk mendapatkan dukungan dari para konstituen yang kecewa terhadap kinerja petahana yang dianggap telah gagal menyelesaikan persoalan pembangunan rumah dan bantuan sosial bagi para korban bencana.

Isu kegagalan penanganan bencana oleh petaha menjadi momentum dan menjadi instrumen strategis pasangan JODA dalam melakukan manuver politik ditengah situasi dan kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan secara cepat. Pasangan JODA memanfaatkan ketidakpuasan publik terhadap proses masa transisi rehabilitasi dan rekonstruksi yang dianggap lambat dan tidak sesuai dengan harapan publik. Situasi pandemi covid-19 juga berdampak terhadap tahapan penyelenggaraan pilkada salah satunya pada tahapan kampanye yang diatur menggunakan media sosial. Kampanye dengan menggunakan media sosial merupakan salah satu keunggulan dari pasangan JODA dengan menjadikan situasi dan capaian kinerja penanganan bencana yang belum tuntas sebagai materi utama pada setiap kampanye.

Selain menggunakan media sosial sebagai instrumen kampanye, kehadiran relawan pasangan JODA pada titik-titik yang belum tersentuh oleh bantuan pembangunan RTG dan JADUP dianggap sangat efektif meskipun hanya dengan mendengarkan keluh kesah para korban yang kecewa terhadap sikap petahana yang

terkesan terbang pilih terhadap distribusi bantuan untuk korban bencana. Pendekatan secara langsung ke lokasi pengungsian dan rumah warga yang terdampak paling parah dengan memberikan harapan dan solusi terhadap kondisi mereka yang terkesan diabaikan oleh pemerintah justru menjadi kesempatan untuk meyakinkan publik bahwa pasangan JODA dapat memberikan perubahan nyata terhadap kepentingan mereka. Mekanisme penyaluran bantuan yang berbelit-belit dan sangat birokratis menjadikan petahana terkesan bekerja lamban dalam penanganan bencana, berbeda dengan kandidat lainnya yang proses distribusi bantuan dapat dilakukan kapan saja, sesuai dengan kebutuhan dilapangan.

5.9 Kemenangan Penantang Djohan-Dany Pada Kontestasi Pilkada Di Kabupaten Lombok Utara.

Keberhasilan para kandidat dalam kontestasi politik dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya terletak pada strategi yang digunakan dalam berlaga pada panggung politik. Berbagai strategi politik di gunakan guna mendapatkan kemenangan oleh pasangan calon termasuk bagaimana simpatisan dapat dikendalikan oleh kandidiat, apakah menggunakan sumber daya paksaan atau dengan instrumen yang lebih halus pendekatan personal. Pemilihan isu penanganan bencana menjadi materi kampanye oleh Pasangan Djohan-Dany di anggap sangat tepat. Kemenangan meyakinkan JODA pada perhelatan Pilkada Lombok Utara, tidak hanya meruntuhkan prediksi banyak pengamat dan lembaga survei tetapi menegaskan bahwa bencana menjadi salah satu faktor kunci kemenangan kandidat pada kontestasi politik. Kemenangan Pasangan JODA salah satunya ada pada strategi posisioning yang tepat yaitu:

- (1) Salah satu metode yang digunakan yaitu Kampanye secara langsung dengan para pemilih meskipun dalam situasi pandemi;
- (2) Adanya ketentuan PKPU yang memberikan ruang untuk melakukan kampanye pada platform media sosial, sehingga tim JODA berinovasi berkampanye dengan menggunakan musik dan lagu-lagu yang mengangkat isu penanganan bencana.
- (3) Menjadikan isu penanganan bencana yang belum tuntas sebagai modal dalam melakukan kampanye. Terutama terkait dengan Persoalan RTG dan jaminan Hidup bagi korban alam yang belum tuntas.

Membangun isu penanganan bencana sebagai media kampanye Paslon Djohan-Dany dianggap efektif karena menysasar langsung kebutuhan publik di saat krisis. Situasi dan kondisi masyarakat yang serba kesusahan menjadi momentum elektoral bagi pihak penantang untuk menghantam petahana dengan berbagai isu-isu strategis dalam penanganan bencana di Lombok Utara. Bencana bisa menguntungkan petahana Djohan-Dany dengan menjadikan isu bencana sebagai panggung kritik terhadap petahana. Pembangunan perumahan dan bantuan sosial masyarakat korban bencana yang belum terselesaikan secara menyeluruh justru menjadi alat bagi kandidat penantang untuk terus menyerang petahana secara masif.

Tabel. 5.8

Isu Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi, Menjadi Peluang Dukungan Politik Bagi Pasangan Djohan-Dany Pada Pilkada Lombok Utara Tahun 2020.

No	Isu Bencana Menjadi Peluang Dukungan Politik Djohan-Dany	Keterangan
1.	Isu Penanganan bencana yang belum tuntas.	Kemampuan kandidat penantang merespons situasi bencana menjadi isu

		politik memperkuat kekayaan elektoral penantang.
2.	Distribusi bantuan yang terkesan tidak menyeluruh.	Penyaluran bantuan bagi korban bencana dilakukan secara bertahap oleh pemerintah, diakibatkan karena keterbatasan anggaran. Kondisi inilah yang dijadikan senjata oleh paslon penantang untuk menghatam petahana dengan membangun isu penanganan bencana yang tidak selesai.
3.	Deklarasi pro terhadap penyelesaian isu bencana sebelum pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan.	Pasangan Djohan-Dany berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan Perumahan dan Bansos Jaminan Hidup jika mereka memenangkan kontestasi Pilkada.

Sumber: *Data Diolah, 2024.*

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa dalam situasi masa peralihan pasca bencana sangat potensial untuk dijadikan sebagai media kampanye guna mendapat dukungan publik, paslon penantang memiliki kemampuan dalam mengelola situasi bencana menjadi kebijakan yang pro terhadap masyarakat yang menjadi korban bencana alam dengan memberikan penilaian negatif terhadap capaian dan kinerja pemerintah/petahana yang dianggap belum mampu menyelesaikan persoalan perumahan dan bantuan sosial jaminan hidup kepada masyarakat korban bencana di Lombok Utara. Situasi krisis tersebut sangat dimanfaatkan oleh Djohan-Dany untuk mendapatkan dukungan publik sekaligus memperkuat elektoralnya.

Dalam rangka meyakinkan pemilih pasangan JODA menjadikan isu penanganan bencana sebagai isu utama dalam pencapaian visi dan misi pemerataan pembangunan infrastruktur salah satunya adalah fokus terhadap penuntasan persoalan infastruktur RTG. Pembangunan isu berkaitan dengan capaian pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu potensi yang dijadikan peluang bagi pasangan calon Djohan-Dany Akbar untuk menyerang

pasangan Calon petahana yaitu Najmul-Suardi (NADI) yang memang kondisi pada saat itu masih berkuat pada persoalan penyelesaian rehabilitasi rumah bantuan gempa yang belum terselesaikan.

Satu hal yang menarik jika kita melihat proses pertarungan politik kedua pasangan calon pada 2020 lalu, yaitu pertarungan ide dan gagasan dalam melakukan pemasaran politik pasangan calon itu sendiri. Jika dilihat dari Pasangan calon JODA lebih mampu untuk mempengaruhi publik dengan menyuguhkan gaya komunikasi politik menggunakan instrumen lagu-lagu yang memang harus diakui lebih mendapatkan respons positif dari publik terutama di kalangan kaum muda. Kecenderungan golongan muda lebih menyukai pasangan calon yang identik dengan jati diri mereka yaitu media kampanye dengan menggunakan lagu-lagu dan instrumen lainnya. Beberapa contoh lagu dari pasangan Calon Djohan-Dany yang sangat terkenal pada saat Pilkada di Lombok Utara 2018 yaitu:

Tabel. 5.9

Daftar Judul Lagu Kampanye JODA

No	Judul Lagu	Materi Lagu-lagu Pasangan Djohan-Dany
1	Beriuok elok Menimuk	Dukungan untuk pasangan yang berasal dari timur dengan jumlah pemilih paling besar di Kec. Bayan
2	Jadup (Johan Danny Sanggup)	Bentuk ajakan kepada masyarakat bahwa 5 tahun masa pemerintahan Najmul tidak membawa perubahan
3	Saudagar Percek	Ajakan untuk memilih tidak berdasarkan uang yang manfaatnya hanya sementara.
4	JODA Bangkit Dengan Inovasi	Ajakan untuk mengembalikan marwah KLU untuk lebih baik lagi

5	Joda Akbar Sanggup	Bahwa pemimpin yang dibutuhkan oleh KLU adalah pemimpin yang ahli dalam birokrasi, politik dan ahli konstruksi sesuai dengan latar belakang dan pengalaman calon JODA
6	Menganti Keputusan	Hanya dalam diri pasangan JODA yang memiliki jiwa pejuang, tegas dan tanpa pamrih dalam membangun daerah itu ada dalam pasangan Djohan – Danny (JODA)
7	Angkat Satu Jari	Ajakan untuk memilih pasangan nomor urut 1 yaitu JODA
8	Rakyat Memanggil	Dari ujung Kec. Bayan sampai ujung barat untuk perubahan.
9	RTG (Rakyat Terlanjur Galau)	Perlunya mengganti pemimpin untuk memberikan perubahan kesejahteraan kepada masyarakat.
10	Rika, Rinso	Proses rehabilitasi perumahan untuk korban gempa belum tersalurkan secara menyeluruh

Sumber : Tim Media Pasangan Djohan-Dany Pada Pilkada Lombok Utara, 2020.

Instrumen yang digunakan untuk meyakinkan pemilih oleh Pasangan JODA selain menggunakan strategi pemasaran langsung dan via media sosial adalah dengan memanfaatkan musik sebagai media komunikasi politik, cara ini dianggap efektif di tengah begitu banyaknya pemilih yang masuk dalam kategori generasi muda. Pemilihan materi yang sangat sesuai dengan kondisi daerah yang pada masa pemulihan pasca gempa bumi, tentunya menambah nilai dari pesan yang ingin disampaikan. Melalui pesan lirik lagu yang mendalam berkaitan dengan ketidakmampuan pemerintah menyelesaikan isu perumahan dan jaminan hidup masyarakat yang masih menjadi persoalan utama pada masa pemulihan tentunya semakin lebih meyakinkan publik. Beberapa makna lagu tersebut adalah:

1. Beriuk Elok Menimuk: Bermakna mari sama menuju ke timur sekaligus mengajak masyarakat khususnya di kabupaten Lombok Utara untuk mengarah dukungan dan pilihannya untuk Djohan Dan Danny. Karena sesungguhnya kedua kandidat ini ada di dua wilayah Kabupaten Lombok Utara yakni pasangan Djohan-Dany identik dengan timur sedangkan pesaingnya atau kandidat lawan berada di bagian barat Kabupaten Lombok Utara.
2. JADUP (Djohan – Danny Sanggup): Lagu ini menceritakan bahwa hanya pasangan Djohan – Danny yang Sanggup atau yang bisa memimpin Kabupaten Lombok Utara. Disamping Itu ada sebuah ajakan untuk ingat memilih Djohan Danny. Dan mengingatkan kepada semua orang atau masyarakat Kabupaten Lombok Utara bahwa sudah 5 tahun ini merasakan kesusahan karena pemimpin sebelumnya. Untuk itu mengajak semua lapisan masyarakat agar jangan salah dalam memilih pemimpin dan dianjurkan untuk memilih pemimpin yang benar sehingga tidak menyesal dikemudian hari.
3. Saudagar Percek: Lagu ini berisikan pesan moral yang mana banyak di kalangan politisi ketika sudah dekat musim pemilu banyak dari politisi membagikan uang hanya untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih. Di samping itu juga ada sebuah pesan kepada masyarakat atau pelajaran politik bagi masyarakat agar jangan menukarkan suaranya hanya karena uang yang bisa dinikmati satu hari tetapi malah nanti akan menyengsarakan masyarakat. Dan menganjurkan masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dalam menentukan pilihan bukan karena uang tetapi karena hati nurani demi kemajuan masyarakat.
4. JODA AKBAR Bangkit Dengan Inovasi: Ini menceritakan seorang pemimpin yang tidak banyak bicara dan banyak berjanji tetapi langsung memberikan bukti

yang bisa dilihat oleh masyarakat. Subtansi menekankan bahwa hanya JODA akbar yang bisa mengembalikan marwah kabupaten Lombok Utara dan menjadi solusi membangun daerah lebih baik lagi.

5. JODA AKBAR sanggup: Menceritakan tentang kekayaan alam dan kekayaan budaya di kabupaten Lombok Utara dan menjadi kabupaten yang subur dan mengajak asyarakat Lombok Utara untuk memilih JODA Akbar agar lebih makmur. Karena ditopang dengan pemimpin yang ahli dalam birokrasi, politik dan ahli konstruksi. Dengan pasangan JODA adalah Pasangan yang sangat berharga.
6. Mengganti sebuah keputusan: artinya menunggu sebuah keputusan. Lagu ini menceritakan tentang tekad seorang calon pemimpin dan keteguhan hati dalam menghadapi setiap fitnah dan cobaan tidak menyurutkan tekad untuk membangun daerah yang di cintai dan hanya dalam diri pasangan JODA yang memiliki jiwa pejuang, tegas dan tanpa pamrih dalam membangun daerah itu ada dalam pasangan Djohan – Danny calon pemimpin sejati.
7. Angkat Satu jari: mengingatkan kepada masyarakat bahwa beda calon itu wajar dan jangan saling caci. Serta mengajak semua masyarakat untuk ikut memilih pada 9 Desember agar sama memberikan dukungan kepada pasangan Djohan-Dany.
8. Rakyat Memanggil: lagu yang menceritakan bahwa dari Kecamatan Bayan sampai Pemenang inginkan sebuah perubahan, dan kemajuan bukan sekedar janji semata. Mengajak masyarakat kepal tangan menjadi simbol kesanggupan memilih pasangan JODA AKBAR untuk membawa perubahan.

9. RTG (Rakyat Terlanjur Galau): mengajak kepada masyarakat untuk mengalihkan pilihannya kepada JODA AKBAR pemimpin hari ini tidak memberikan perubahan. Sudah saatnya Kabupaten Lombok Utara menjadikan pemimpin atau kepala Daerah yang baru.
10. Rika Rinso: Lagu dengan judul rika rinso ini merupakan salah satu lagu yang memberikan kritikan kepada pemerintah terkait dengan realisasi bantuan perumahan tahan gempa (RTG) kepada masyarakat termasuk dengan bangunan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang pada saat itu mengalami trauma yang sangat mendalam.

Strategi politik pasangan JODA pada Pilkada Lombok Utara 2020, salah satunya adalah menggunakan lagu-lagu sebagai media kampanye yang bertemakan isu-isu politik yang memang menjadi persoalan di Lombok Utara pada saat itu. Situasi pandemi juga sesungguhnya memberikan keuntungan tersendiri bagi pasangan JODA, di mana pada saat itu semua proses dan tahapan penyelenggaraan harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Media sosial merupakan salah satu platform kampanye yang resmi digunakan oleh pasangan calon yang berkompetisi pada saat itu. Sehingga lagu-lagu yang bertemakan tentang isu politik terutama perumahan dan jaminan sosial bagi korban gempa, hampir didengarkan di setiap pelosok Lombok Utara. Setiap lagu kampanye JODA AKBAR mempunyai tempat di hati para pemilih khususnya masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Sebagaimana yang dikatakan oleh R. Nuna Abriadi (Dalam Stigna, 2022).

“Tidak bisa dipungkiri lagu – lagu yang kita ciptakan untuk memenangkan pak H. Djohan Syamsu itu menjadi box office menjadi trading yang hampir semua rumah itu menyetel itu dan memang enak masyarakat mendengarnya enak syairnya enak menjadi Hits yang luar biasa yang di gandrungi oleh semua masyarakat kita baik itu syairnya maupun liriknya.

Ketua Tim Muda Pemenangan Pasangan Djohan-Dany, Dende Devi Sarah

Mandini, pada 3 November 2025:

“Pasangan JODA melihat adanya peluang yang sangat terbuka ketika pasangan petahana tidak mampu menyelesaikan persoalan RTG dan JADUP, setiap kampanye kami menyampaikan penanganan Pembangunan perumahan yang tidak tuntas kepada masyarakat dan itu sangat efektif mempengaruhi pemilih. Isu bencana betul-betul sangat ampuh untuk meyakinkan pemilih bahwa perlu ada perubahan kepemimpinan jika ingin persoalan perumahan dan bantuan sosial jaminan hidup dapat diselesaikan dengan tuntas. Tim Media kami juga menyerang pasangan petahana dengan lagu-lagu yang di desain bertemakan kegagalan pemerintah dalam penanganan bencana termasuk lagu-lagu yang bertemakan perubahan. Saya melihat, kekalahan petahana Najmul-Suardi pada saat itu memang kuat karena isu kegagalan dalam penanganan bencana ditengah kehidupan masyarakat yang serba sulit. Jadi itu kami jadikan momentum untuk materi kampanye dan sangat efektif.

.

Penuturan dari seorang warga masyarakat Desa Rempek Kecamatan Gangga, Dekadi, wawancara pada tanggal 3 Desember 2024. Berikut petikan hasil wawancaranya:

Pemda KLU tentu sangat berpotensi dalam menyelesaikan persoalan gempa terutama masalah RTG, namun Pemda terkait masih bergantung pada kebijakan pusat. Sehingga bila dibilang tidak ada potensi yang mencerminkan dalam penyelesaian persoalan gempa, termasuk penyelesaian permasalahan RTG, masih banyak Masyarakat yang belum menerima bantuan RTG. Dalam konteks RTG, belum maksimalnya pemda dalam menyeleksi penerima manfaat bantuan RTG sehingga banyak ditemukan data anomali, dobel rekening dan lain sebagainya. Dalam konteks bantuan lain (JADUP) tidak bisa direalisasikan. Kekalahan Najmul-Suardi pada perhelatan Pilkada 2020 di Lombok Utara, sangat dipengaruhi oleh isu penanganan bencana RTG, karena kinerja pemerintah yang dalam hal ini posisi Najmul-Suardi sebagai petahana dijadikan sebagai evaluasi masyarakat, apakah kinerja menyelesaikan perumahan tahan gempa (RTG) dan distribusi bantuan jaminan hidup (JADUP), mampu di selesaikan secara maksimal atau tidak. Tentunya dengan kondisi masyarakat yang serba susah akan mudah memberikan penilaian terhadap petahana dari kinerja yang dilakukan. Bisa di katakan masyarakat dapat menghukum calon petahana

Najmul-Suardi karena isu bencana khususnya untuk pembangunan kembali perumahan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara.

Membangun isu tentang penanganan bencana yang dikemas dalam bentuk lagu-lagu tentunya merupakan strategi brilian yang dilakukan oleh pasangan JODA, pasalnya semakin sering lagu-lagu diputar di tengah masyarakat secara otomatis semakin terbuka ruang untuk promosi bagi pasangan JODA, apalagi isu yang dibangun adalah terkait dengan persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat, tentunya hal ini semakin menambah nilai dari pesan yang ingin disampaikan lebih tepat sasaran. Pembangunan citra diri Djohan-Dany dengan memanfaatkan momentum evaluasi kinerja percepatan pemulihan pasca bencana dari pemerintah sebagai positioning utama kampanye, mampu mengerus elektoral petahana. Serangan yang terus dilancarkan oleh pasangan JODA terkait dengan isu penanganan bencana menghantam kondisi psikologis masyarakat yang dalam kondisi tidak baik. Materi kampanye yang disuguhkan dengan membuat tagline perubahan untuk penanganan bencana ditengah banyaknya persoalan perumahan dan bantuan sosial mampu mengerus elektoral petahana secara signifikan.

5.10 Anatomi Dekonstruksi Kekuasaan: Dialektika Faktor Struktural Dan Agensi Dalam Tumbangnya Petahana NADI Pada Pilkada Lombok Utara 2020.

1. Faktor Struktural Kekalahan Petahana

Tumbangnya petahana dalam proses kontestasi di Lombok Utara, salah satunya dipengaruhi oleh faktor eksternal diluar kendali petahana secara kewenangan peraturan dan kebijakan pemerintah di atasnya, baik itu pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah provinsi. Rivani (2017) menjelaskan bahwa dalam proses implementasi penyelenggaraan kebijakan dan program untuk penanggulangan secara optimal tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan jumlah bageting yang tersedia, proses pencairan serta penggunaannya yang tepat sasaran sehingga memiliki nilai dampak yang nyata bagi kondisi masyarakat.

Struktur anggaran masa pemulihan menjadi salah satu penyebab kekalahan pasangan NADI pada Pilkada Lombok Utara 2020. Penyaluran bantuan pada masa rekonstruksi melalui kelompok masyarakat terkesan sangat struktural dan bukan langsung ke korban sebagai pihak yang menjadi sasaran bantuan. Meskipun penjelasan pemerintah dengan menggunakan skema kelompok masyarakat (pokmas) bertujuan untuk tetap menjaga akuntabilitas dalam system kontrol penggunaan dana bantuan pembangunan perumahan bagi korban bencana. Namun secara proses dan pelaksanaan terkesan lambat, terlalu birokratis dan rawan terjadinya konflik secara lokal di tengah masyarakat. Pemerintah daerah sangat menyadari kondisi tersebut sangat berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat tetapi semua kebijakan memang menjadi ketentuan pemerintah pusat bukan kebijakan dari pemerintah daerah.

Implikasi politik dari kebijakan pemerintah pusat terhadap penanganan pasca bencana di Lombok Utara terhadap calon petahana adalah tergerusnya kepercayaan publik terhadap kinerja petahana yang dianggap tidak memiliki kemampuan melakukan lobi dan negosiasi dalam penanganan bencana. Publik tidak membedakan mana kebijakan dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Publik hanya melihat pemerintah yang berkuasa menjadi pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kondisi tersebut. Hal tersebut disebabkan karena masa pemulihan dianggap tidak

visible bagi masyarakat yang hidup dalam kondisi darurat dan serba kekurangan menyebabkan frustrasi dan trauma yang mendalam.

Selain persoalan anggaran yang begitu besar untuk melakukan masa pemulihan, persoalan teknis juga menjadi kendala dari pemerintah daerah dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat yang termasuk dalam *kluster* rusak berat, ringan, dan sedang. Identifikasi dan verifikasi mengalami kendala yang begitu terasa pasalnya domisili masyarakat yang terdampak gempa tidak berlokasi pada satu titik tetapi berpindah-pindah mengakibatkan petugas yang melakukan pendataan mengalami kendala. Selain itu juga, tahapan pemulihan pasca gempa Lombok beririsan dengan perhelatan Pilpres yang berdampak terhadap proses pemulihan daerah pasca bencana yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara. Kondisi inilah yang menjadikan pemerintah daerah KLU mengalami kesulitan pada masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana dikarenakan keterbatasan anggaran, sumber daya yang terbatas serta kendala teknis di lapangan yang terkesan proses pemulihan pasca bencana menjadi tidak maksimal. Sehingga kondisi tersebut memunculkan persepsi publik yang merasa dipersulit dalam akses dana bantuan pembangunan rumah tahan gempa.

Hal ini senada apa yang disampaikan oleh Calon Wakil Bupati, H. Suardi., pada saat melakukan wawancara,

“Bahwa kalau kita berbicara masyarakat yang mendapatkan bantuan tentunya bagi yang mendapatkan bantuan lebih awal merasa senang, tetapi bagi masyarakat yang terlambat mendapatkan bantuan tentunya pasti tidak senang. Proses masa *recovery* pada saat penanganan terkait dengan pendataan masih mengalami kendala, oleh karena itu, dari segi data harus betul-betul dilakukan proses validasi yang tepat dan akurat, sehingga yang benar-benar rusak berat, sedang dan ringan merupakan data yang valid. Proses masa pemulihan yang terkesan lamban juga diakibatkan pengaruh politik Pilpres, akibatnya jadi asal-asalan, tahapan yang tidak jelas, termasuk juga berkaitan dengan data. Masyarakat ada yang tinggal di hutan,

adanya masyarakat yang tinggal di tanah bukan milik dia, semua persoalan itu harus diselesaikan. Ada warga masyarakat yang rumahnya sederhana, sengaja dirusak, agar masuk kategori rusak berat. Ada juga toko, padahal toko juga kan tidak boleh, ada juga yang Gudang. Jadi harapan masyarakat, yang dapat tentunya puas, dan yang belum dapat pasti kecewa, ia relative”.

Statemen tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Suradi Relawan pemenangan pasangan Najmul-Suardi, pada 10 Maret 2025. Berikut petikan hasil wawancaranya:

Secara regulasi, RTG tidak ada persoalan, berjalan lancar sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada. Akan tetapi banyak dipersoalkan terkait dengan isu bencana, kalau kita melihat tingkat penyelesaiannya banyak sekali progress di Lombok Utara. Kalau penanganan menurut saya sudah maksimal, sudah efektif, ya kembali terkait dengan progres.

Senada dengan pernyataan diatas, menurut Sugianto, Wakil Ketua tim pemenangan Pasangan Najmul Suardi, wawancara pada tanggal 18 April 2025. Berikut petikan wawancaranya:

Isu yang berkembang pada saat menjelang pemilihan pada saat itu, Iya, isu kebencanaan waktu itu setahun lebih sedikit pasca bencana gempa sehingga ada isu Jadup, RTG, itu ya memang menjadi tugas kita. Salah satunya memang ada faktor, yang pada saat itu memang dana Jadup yang kemudian jadi Gorengan banyak pihak. Rival mengatakan Jadup itu cair dan dikatakan itu ditahan, digunakan oleh Pak Najmul untuk dana kampanye. Kalau di masa pemerintahan Pak Najmul tidak begitu terkendala, karena jumlah yang terbangun itu jumlahnya banyak dan cepat sekali. Sesuai dengan harapan masyarakat. Sudah efektif, cuman terkait ada yang belum terselesaikan, tapi karena transisi pemerintahan itu, seperti data anomali, sehingga tidak dapat mengejar target yang diberikan oleh pusat.

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh seorang warga masyarakat Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Ariawan Hadi, pada tanggal 27 Desember 2024. Berikut petikan hasil wawancara:

Menang betul, kekalahan petahana pada saat pilkada lombok Utara 2020 lalu, disebabkan karena faktor isu penanganan bencana yang belum terealisasi dengan menyeluruh. Karena setiap kinerja pemerintah dalam hal ini petahana selalu ada celah untuk dibuatkan isu yang mempengaruhi

menurunnya kepercayaan masyarakat. Dua isu yang menjadi konsen publik pada saat masa pemulihan bencana di Lombok Utara adalah isu perumahan dan isu bantuan sosial berupa jaminan hidup. Kedua capaian isu tersebut menjadi topik utama para kandidat pada saat pemilihan kepala daerah tahun 2020. Kedua kandidat menjadikan isu penanganan bencana sebagai media saling menyerang satu sama lain.

Perkembangan penanganan pasca bencana sesungguhnya menunjukkan trens yang positif berdasarkan hasil wawancara dengan responden pendukung Najmul-Suardi, namun ditemukan banyak persoalan terkait dengan pelaksanaan secara teknis dilapangan, seperti, terdapat data anomali penerima manfaat bantuan perumahan dan bantuan hidup bagi korban bencana. Kompleksivitas persoalan penanganan bencana menjadikan progres pemerintah terkesan tidak maksimal.

Berdasarkan hasil temuan lapangan yang dilakukan dengan pendalaman wawancara dengan pihak-pihak terkait menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kekalahan petahana pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Lombok Utara dapat digambarkan sebagai berikut:

Table.5.10
Faktor Eksternal Tumbangnya Petahana Pada Lombok Utara 2020

No	Faktor yang mempengaruhi kekalahan Petahana Pada 2020 di Lombok Utara	Keterangan
1.	Politisasi isu terkait bantuan Rumah Tahan Gempa (RTG) dan Jaminan Hidup (JADUP)	Petahana tidak mampu meng-counter publik terhadap isu yang terbangun di masyarakat terkait dengan distribusi bantuan RTG dan JADUP
2	Data masyarakat penerima bantuan yang tidak akurat	Masih belum meratanya penerima bantuan RTG

3	<i>Over Confident</i> atau terlalu percaya diri melihat hasil survei.	Kondisi tersebut membuat tim tidak maksimal dalam menangkis serangan lawan dengan menjadikan isu penanganan bencana sebagai senjata utama di tengah dinamika masyarakat bawah yang bergejolak.
4	Banyak pendukung yang beralih pilihan politik disebabkan karena tidak mendapatkan kepastian bantuan baik itu RTG maupun JADUP.	Simpatisan Pasangan Najmul Akhyar dan Suardi banyak yang beralih kepada pasangan calon lain dikarenakan tidak ada kepastian bantuan yang diberikan oleh pemerintah.
5.	Melemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah khususnya berkaitan dengan penanganan pasca bencana alam yang terjadi pada tahun 2018.	Proses penanganan yang terkesan lamban dan berbelit-belit mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Sumber, Analisis Data Penelitian, 2025.

Kekalahan petahana pada Pilkada Lombok Utara 2020, dipengaruhi oleh banyak faktor baik itu secara eksternal maupun secara internal. Kekalahan yang dialami oleh petahana tidak bersifat tunggal yang hanya berkaitan dengan tata kelola pada masa pemulihan saja, namun dipengaruhi juga oleh faktor internal dari dalam tim sendiri. Ketidakharmonisan di dalam tim tidak hanya berdampak terhadap keutuhan namun juga terhadap daya juang para simpatisan, selain itu juga menyebabkan terjadinya migrasi dukungan kepada pasangan calon lain.

2. Faktor Agensi Kekalahan Petahana

Meskipun secara data dan fakta bahwa progres penanganan yang dilakukan oleh petahana pada saat itu mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya dalam

penanganan alam gempa bumi. Pihak lawan tetap menjadikan isu RTG dan JADUP sebagai alat untuk menyerang petahana. “Adanya beberapa masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, maka mereka menggoreng isu terkait RTG dan JADUP ini sebagai serangan yang lebih kuat, sehingga petahana dianggap tidak bekerja dengan maksimal dalam penanganan pasca gempa”. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat terkhusus Rumah Tahan Gempa dianggap tidak tepat sasaran oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai isu yang digunakan untuk menyerang kubu petahana.

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Fajar Marta, selaku Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Najmul-Suardi Pada Pilkada Lombok Utara tahun 2020, berikut petikan wawancaranya:

Ada beberapa hal yang mendasari distribusi bantuan rumah tahan gempa (RTG) mengalami kendala dalam pelaksanaannya yaitu pertama, adalah kurang akurasinya data dan kedua, sistemnya kurang bagus. Kalau penanganannya terus terang Pemerintah itu sangat antusias agar secepatnya pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Lombok Utara tidak hanya melalui lembaga-lembaga Pemerintahan di tingkat pusat, lembaga – lembaga swadaya itu pun kita lakukan pendekatan-pendekatan. Sehingga Bapak Bupati pada saat itu yang menjadi Sekretaris APKASI Pusat, banyak Bupati Gubernur yang menyumbang tidak hanya dari anggaran pusat. Kalau terkait dengan efektivitas penanganan perumahan tahan gempa sangat efektif, karena memang kita dibuat satu kelompok itu ada 5-10 penanganannya, sehingga dari seratus persen yang keluar itu khusus untuk RTG bisa mencapai 80 persen yang *clear*. Adapun yang belum *clear* itu adalah satu penanganan oleh kelompok – kelompok kerja yang waktu itu ada yang tidak bekerja dengan baik. Sejak awal pasangan Najmul-Suardi berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan Pembangunan rumah tahan gempa (RTG). Sebenarnya pemerintah dalam hal ini Najmul Ahyar, sudah bagus dalam melakukan masa pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi Pembangunan rumah tahan gempa (RTG) namun karena dalam posisi sebagai petahana tentunya isu kegagalan itu terus muncul dan di jadikan materi pada setiap kampanye oleh pasangan lawan, akhirnya banyak masyarakat yang terpengaruh.

Senada dengan yang disampaikan oleh Addinul Islami, Tim Relawan Najmul-Suardi Pada Pilkada Lombok Utara tahun 2020, berikut petikan wawancaranya:

“Proses penanganan RTG dan bantuan gempa lainnya cukup tepat sasaran, kalau melihat secara pembangian ya cukup proporsional, sehingga sesuai dengan regulasi yang ada, cepat dan tepat. Terkait dengan deklarasi dan komitmen menyelesaikan persoalan bencana, sudah barang tentu ia, karena jabatan sebagai bupati sudah menjadi tanggung jawab untuk menyelesaikan urusan penanganan pasca bencana. Saya rasa tidak, kalau dikatakan tidak mampu, kita pada saat itu sudah mencapai 70 persen penanganan bencana itu, bisa dikatakan hampir selesai. Tapi kita punya time line, waktu dan jumlah korban yang harus diselesaikan itu tentu dengan masa jabatan beliau yang sudah di ujung, tidak mampu menyelesaikan secara skala waktu, jadi semua masih pada proses berjalan, belum bisa diselesaikan secara sepenuhnya”.

Penuturan dari seorang Relawan Pasangan Najmul Suardi Kec. Tanjung Suryadi, berikut petikan hasil wawancaranya:

Ya memang, karena pada saat itu bencana gempa dan disambut dengan covid, yang menjadi isu utama itu sebenarnya saling hantam isu. Tetapi sebenarnya hanya RTG dan Jadup menjadi modal utama baik dari sisi NADI dan JODA. Kalau kita berbicara data, mereka berbicara tentang orang yang tidak dapat walaupun lebih sedikit pada saat itu, tetapi isu RTG dan JADUP kan belum selesai secara prosedural, itu yang digoreng untuk menghantam NADI pada saat itu. Faktor utama yang kami alami pada saat itu dari sisi tim, ternyata yang kami pakai ketua tim relawan itu adalah dari LSM bukan dari murni orang politik. Sehingga kerja tim pada saat itu tidak terarah, sementara tim parpol yang dipimpin oleh Pak Fajar Marta pada saat itu keadaannya sakit. Sehingga totalitas relawan yang memegang kendali. Dan ada kaitannya dengan perpecahan antara Pak Johan yang pernah kalah dulu pada era NASA, kemudian kekalahan itu untuk menumbangkan Pak Najmul itu sangat kuat dari sisi Pak Johan waktu itu. Kemudian dari sisi partai banyak sekali partai yang mendukung Pak Najmul itu tetapi tidak maksimal. Karena dari NADI kemarin langsung, kalau menyelesaikan partai itu ke pusat. Sehingga yang di bawah itu ada yang sudah deal dengan JODA pada waktu itu. Sebenarnya tidak ada kendala, kami sudah melawan itu RTG dan JADUP itu dengan data sebenarnya. Tetapi situasi pada saat itu masa RTG dibangun, walaupun data kami sajikan lebih besar orang yang dapat, bahkan Pak Najmul waktu itu mendapat bantuan 70 ribu di luar SK. Tetapi yang dikomporsi ini orang yang belum dapat, sehingga bagaimanapun kami menangkis erangan terkait isu RTG dan JADUP pada saat itu lebih ganas yang belum dapat walaupun jumlahnya sedikit. Ada sih faktor lain, yaitu ada aplikator – aplikator nakal, itu yang menjadi kendala. Sehingga ada

yang belum jadi rumahnya, ditinggal, padahal itu bukan kesalahan pemerintah. Dan terkait pilihan masyarakat terkait jenis rumah, banyak yang menolak awalnya. Kemudian kayu pada saat itu harus dengan kayu yang standar sehingga kesulitan kayu. Konvensional pada saat itu, masyarakat masih trauma dengan bahan-bahan cor, itu yang membuat maju-mundur, maju-mundur.

Penuturan dari seorang warga masyarakat Desa Rempek Kecamatan Gangga, Dekadi, wawancara pada tanggal 3 Desember 2024. Berikut petikan hasil wawancaranya:

Dengan adanya bantuan RTG, masyarakat merasa terbantu, sehingga masyarakat tidak begitu pusing dalam memikirkan tempat tinggal, sehingga masyarakat fokus dalam mencari uang untuk pengembangan dan meningkatkan perekonomiannya.

Jika mengacu pada pengumpulan informasi hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa kinerja penanganan bencana sesungguhnya dapat dikatakan berjalan namun menemukan banyak persoalan baik secara teknis maupun kuantitas sumber daya yang belum memadai. Meskipun demikian pasangan Najmul-Suardi sangat optimis mampu memenangkan pertarungan politik pada saat itu, dengan berdasarkan beberapa hasil survei yang menunjukkan trends kemenangan pada pasangan petahana tersebut. Kondisi tersebut berdampak terhadap pergeseran suara petahana yang terus digerus dengan isu penanganan bencana, sementara pasangan petahana tidak ada tim khusus ataupun strategi khusus untuk meng-counter serangan lawan.

Salah satu faktor yang menyebabkan Kekalahan pasangan calon petahana Najmul Akhyar-Suardi (NADI) pada Kabupaten Lombok Utara (KLU) 2020 dipicu oleh *over confident* atau terlalu percaya diri melihat hasil survei sehingga tidak maksimal menangkis serangan lawan serta tak bergerak maksimal mencari suara. Berbagai isu dimainkan oleh kubu Djohan-Danny, salah satunya jaminan dana

hidup (Jadup) korban gempa 2018 yang tak kunjung cair sampai hari pencoblosan. “Kondisi inilah yang dimanfaatkan untuk menyerang petahana secara bertubi-tubi sehingga masyarakat mengalihkan dukungan politiknya kepada pasangan Djohan Dani. Sebagai seorang petahana tentunya publik dapat dengan jelas memberikan pandangannya terhadap kinerja petahana selama menjabat.

Belum realisasinya visi-misi Najmul Akhyar di periode pertama dinilai belum terealisasi secara penuh, sehingga tidak luput menjadi isu sentral yang dimainkan oleh pihak JODA. Pasangan calon Najmul Suardi (NADI) terlalu *over confident* (percaya diri) berlebihan dengan hasil survei, sehingga berimbas terhadap gerakan tim pemenangan dan parpol. “Berbagai serangan dilontarkan itu bisa ditangkis, tapi mesin partai tidak bisa berjalan maksimal menyasar kantong-kantong pemilih yang awalnya basis petahana, kemudian beralih dukungan (<https://radarlombok.co.id>).

Table.5.11

Faktor Internal Tumbangnya Petahana Pada Pilkada 2020

No	Faktor yang mempengaruhi kekalahan Petahana Pada 2020 di Lombok Utara	Keterangan
1.	Pasangan Calon NADI terlalu percaya diri melihat hasil survei.	Kondisi tersebut membuat tim tidak maksimal dalam menangkis serangan lawan dengan menjadikan isu penanganan bencana sebagai senjata utama di tengah dinamika masyarakat bawah yang bergejolak.
2.	Munculnya perpecahan di dalam tim pemenangan dari level Kabupaten, kecamatan, sampai desa.	Tidak solidnya dari tim mengakibatkan tim terpecah menjadi beberapa kubu termasuk juga beralih dukungan kepada pasangan calon yang lain.

3.	Isu strategis Tim yang seharusnya bersifat rahasia menjadi terbuka dan bisa dikonsumsi oleh publik.	Muncul ketidakpercayaan di dalam internal tim
4.	Munculnya Konflik <i>kepentingan</i> dalam internal Team Najmul dan Suardi.	Munculnya nama-nama baru pada struktur Pasangan NADI yang pada awalnya kerap kali mengkritik pemerintah menjadi batu sandungan bagi kekompakan dan soliditas Tim.
5.	Tidak ada tim khusus yang dibentuk untuk melakukan perlawanan terhadap isu bencana dan fitnah-fitnah politik oleh pasangan calon rival	Salah satu faktor penyebab kekalahan petahana pada 2020 di Lombok Utara adalah lemahnya strategi yang dilakukan pasangan calon NADI dalam merespons serangan dari Pasangan calon JODA berkaitan dengan isu penanganan bencana.

Sumber, Analisis Data Penelitian, 2025.

Kekalahan petahana dalam kontestasi Lombok Utara tidak hanya bersumber dari faktor eksternal semata, namun juga justru dari faktor internal pasangan calon Najmul-Suardi sendiri. Isu utama yang menjadi fokus pemulihan pasca bencana adalah sektor perumahan (RTG) dan bantuan JADUP kepada masyarakat korban gempa belum tersalurkan secara merata dan tepat. Proses pendataan yang banyak menimbulkan persoalan di lapangan berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi negatif. Pasangan Calon Najmul-Suardi *Over Confident* atau terlalu percaya diri melihat hasil survei, kondisi tersebut membuat tim tidak maksimal dalam menangkis serangan lawan dengan menjadikan isu penanganan bencana sebagai senjata utama di tengah dinamika masyarakat bawah yang bergejolak.

Simpatisan Pasangan Najmul-Suardi banyak yang beralih kepada pasangan calon lain dikarenakan tidak ada kepastian bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Ikatan ideologi organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap korban melainkan isu penanganan yang menjadi fokus masyarakat korban. Di tengah pertarungan politik muncul perpecahan di dalam internal tim NADI berdampak terhadap solid dari tim serta beralihnya dukungan kepada pasangan calon yang lain. Munculnya nama-nama baru pada struktur Pasangan NADI yang pada awalnya kerap kali mengkritik pemerintah menjadi hambatan bagi tim, karena dianggap tidak berjuang dari awal.

Dalam situasi krisis pemilihan pasca, isu yang berkembang dan utama adalah perumahan dan bantuan sosial yang belum tuntas secara menyeluruh dan sesuai dengan keinginan masyarakat di bawah. Masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan RTG dan JADUP menjadi isu utama yang digunakan oleh pasangan lawan Djohan-Dany menyerang petahana pada setiap kali melakukan kampanye baik secara langsung maupun menggunakan media sosial. Pasangan NADI, terkesan lebih bertahan terhadap serangan yang dilontarkan oleh kubu lawan sehingga berdampak terhadap perolehan suara Najmul-Suardi yang menurun drastis di beberapa wilayah. Tidak adanya tim khusus yang dibentuk untuk melakukan serangan balik terhadap isu bencana dan fitnah-fitnah politik oleh pasangan calon lawan. Salah satu faktor penyebab kekalahan petahana pada 2020 di Lombok Utara adalah lemahnya strategi yang dilakukan pasangan calon NADI dalam merespons serangan dari Pasangan calon JODA berkaitan dengan isu penanganan bencana.